



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta seiring dengan agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu memberikan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 35);
21. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyuwangi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah bagian pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program dan kegiatan.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
14. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.

18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
21. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
22. Kinerja adalah keluaran (*output*)/hasil (*outcome*) dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
23. Kinerja Proses adalah seluruh kegiatan/tugas/aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran kegiatan atau sasaran program yang telah ditetapkan/ditargetkan.
24. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
25. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
26. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja atau unit kerja pada perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pergerakan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

27. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan perangkat daerah.
28. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
29. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.
30. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program.
31. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
32. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atau tugas jabatannya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
33. Perjanjian Kinerja atau disebut kontrak kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi atau atasan kepada pimpinan instansi yang lebih rendah atau bawahan untuk melaksanakan program/kegiatan/tugas yang disertai dengan indikator kinerja.
34. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan atau tugas yang dilaksanakan.
35. Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

36. Aktivitas/kegiatan yang dilaksanakan diluar jam kerja adalah aktifitas/kegiatan yang dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu.

BAB II

JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 2

Jenis TPP terdiri dari :

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (nilai/kelas) jabatan;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kinerja;
- c. tambahan penghasilan untuk menunjang mobilitas kerja.

BAB III

KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan berdasarkan beban kerja atau bobot (nilai/kelas) jabatan berbasis kedisiplinan/presensi elektronik.
- (2) Bobot (nilai/kelas) jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan berdasarkan capaian kinerja yang meliputi :
 - a. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan selama jam kerja dan diluar jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. capaian kinerja atas perjanjian kinerja/kontrak kinerja yang dinilai/diukur setiap bulanan dan/atau tribulanan, baik capaian kinerja proses (hasil kerja dari bawahan/sundulan) maupun kinerja individu *output/outcome*.

- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural berdasarkan eselon sebagai pengganti atas penggunaan kendaraan pribadi atau tidak mempergunakan kendaraan dinas operasional jabatan dalam perjalanan dari rumah/tempat tinggal ke kantor/tempat kerja dan/atau dari kantor/tempat kerja ke rumah/tempat tinggal.
- (5) Penggunaan kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Aktifitas/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a yang dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu dihitung menjadi komponen tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dengan ketentuan maksimal aktifitas/kegiatan per hari 4 (empat) jam.

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan administrator;
 - b. jabatan pengawas; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jabatan fungsional keahlian; dan
 - b. jabatan fungsional keterampilan.
- (4) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c diberikan kepada pejabat struktural (jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas).

Pasal 5

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan bagi PNS yang telah memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 - a. para guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, pengawas sekolah dan penilik sekolah;
 - b. para pegawai pada Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD menunjuk/menetapkan PNS dalam jabatan pelaksana/fungsional dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penunjukkan/penetapan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PROSEDUR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (nilai/kelas) jabatan yang diterima PNS dalam 1 (satu) bulan dipengaruhi oleh skor prestasi kehadiran.
- (2) Tambahan penghasilan untuk menunjang mobilitas kerja yang diterima PNS dalam 1 (satu) bulan dipengaruhi oleh skor aktivitas pegawai.
- (3) Skor prestasi kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, yang meliputi:
 - a. keterlambatan masuk kerja;
 - b. kepulangan mendahului jam kerja;
 - c. ketidakhadiran kerja karena cuti;
 - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti; dan
 - e. tidak presensi masuk kerja setelah istirahat siang.

- (4) Skor aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator aktivitas kehadiran pada hari kerja, yang meliputi:
 - a. ketidakhadiran kerja karena melakukan/melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan mengikuti diklat luar daerah;
 - b. ketidakhadiran kerja karena cuti;
 - c. ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah/dengan keterangan yang sah.
- (5) Skor prestasi kehadiran/skor aktivitas PNS setiap bulan dicetak melalui Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai/Sistem Presensi Pegawai.
- (6) Dalam melakukan penghitungan skor prestasi kehadiran/skor aktivitas pegawai untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja untuk dinas luar, kegiatan berupa mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya dihitung sebagai hari masuk kerja.
- (7) Dalam melakukan penghitungan skor aktivitas pegawai untuk tambahan penghasilan menunjang mobilitas kerja, untuk ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sebagai hari tidak masuk kerja.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja yang diterima PNS dipengaruhi oleh skor capaian kinerja dalam 1 (satu) bulan.
- (9) Skor capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan berdasarkan indikator, yang meliputi:
 - a. poin aktifitas kerja;
 - b. nilai capaian kinerja proses dari bawahan;
 - c. nilai capaian kinerja individu *output/outcome*.
- (10) Skor capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diinput/dicetak melalui aplikasi E-Kinerja dan Sistem Informasi Monitoring Kinerja Pegawai (SIM-K).

Pasal 8

- (1) Metode penghitungan skor prestasi kehadiran PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- a. Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 1. terlambat sampai dengan 15 (lima belas) menit:

$$\text{Skor 1} = 100 - (2 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 2. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam:

$$\text{Skor 2} = 100 - (2,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 3. terlambat lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2 (dua) jam:

$$\text{Skor 3} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 4. terlambat lebih dari 2 (dua) jam:

$$\text{Skor 4} = 100 - (3,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan})$$
 - b. Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor 5} = 100 - (2,75 \times \text{hari pulang cepat})$$
 - c. Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dihitung dengan rumus sebagai berikut:
 1. tidak hadir kerja karena cuti sakit:

$$\text{Skor 6} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
 2. tidak hadir kerja karena cuti diluar tanggungan negara:

$$\text{Skor 7} = 100 - (1 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
 3. tidak hadir kerja karena cuti besar (haji/umrah), cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting:

$$\text{Skor 8} = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
 - d. Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf d, dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 1. tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah:

$$\text{Skor 9} = 100 - (4,4 \text{ per jumlah hari kerja} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$
 2. Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah:

$$\text{Skor 10} = 100 - (3,5 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran})$$

- e. Indikator kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf e, dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor 11} = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari tidak presensi masuk kerja setelah istirahat siang});$$
- (2) Skor prestasi kehadiran dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Skor prestasi kehadiran} = 100 - \{1100 - (\text{Skor 1} + \text{Skor 2} + \text{Skor 3} + \text{Skor 4} + \text{Skor 5} + \text{Skor 6} + \text{Skor 7} + \text{Skor 8} + \text{Skor 9} + \text{Skor 10} + \text{Skor 11})\}$$
- (3) Apabila hasil penjumlahan skor 1 sampai dengan skor 11 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan 1000 atau kurang, maka skor prestasi kehadiran pegawai yang bersangkutan sama dengan 0 (nol).
- (4) Metode penghitungan skor aktivitas pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{Skor} = 100 - (1/30 \text{ hari} \times 100 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran kerja})$$

Pasal 9

- (1) Ketidakhadiran kerja karena cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan Pasal 7 ayat (4) huruf b tidak termasuk ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan.
- (2) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 1 adalah tidak membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) atau membuat surat keterangan (izin/pemberitahuan) namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (3) Tidak hadir kerja dengan keterangan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2 tidak termasuk tidak hadir kerja karena alasan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 10

Besaran TPP dirumuskan sebagai berikut :

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (nilai/kelas) jabatan, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = (\text{Skor prestasi kehadiran} / 100) \times \text{nilai jabatan} \times \text{harga satuan nilai jabatan}$$

- b. Tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = [(\text{Nilai capaian poin bobot aktivitas kerja pegawai per bulan pada jam kerja (6600) dan diluar jam kerja (1920) x harga poin aktivitas per kelas jabatan})] \times [(\text{Nilai capaian kinerja proses dari bawahan x 80\%}) + (\text{Nilai capaian kinerja individu } \textit{output/outcome} \times 20\%)]$$

- c. Tambahan penghasilan untuk menunjang mobilitas kerja, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TPP} = (\text{Skor aktivitas pegawai}/100) \times \text{Besaran Uang Penunjang Mobilitas Kerja}$$

- d. Total tambahan penghasilan PNS (TPP), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Total TPP} = [(\text{TPP beban kerja atau bobot (nilai/kelas) jabatan} + \text{TPP kinerja}) \times \text{Faktor penyeimbang}] + \text{TPP Penunjang Mobilitas.}$$

Pasal 11

- (1) Besaran harga untuk setiap nilai jabatan tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Besaran harga untuk setiap poin aktivitas pegawai per kelas jabatan tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Besaran uang penunjang mobilitas kerja tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setiap SKPD/Unit Kerja mempersiapkan/menyediakan perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *fingerprint*/wajah/retina.

- (2) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen Kinerja Kehadiran Pegawai atau perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *fingerprint*/wajah/retina terjadi kendala/tidak dapat dioperasikan karena *error* sistem/*error* perangkat atau karena listrik mati maka metode penghitungan skor kehadiran PNS/skor aktivitas PNS dapat dilaksanakan secara manual.
- (3) Bagi SKPD atau Unit Kerja yang belum memasang/belum mempunyai perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi elektronik dengan menggunakan *fingerprint*/wajah/retina maka metode penghitungan skor kehadiran pegawai dapat dilakukan secara manual.

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Kabupaten tidak dapat diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi instansi di luar Pemerintah Kabupaten yang belum menerapkan tambahan penghasilan dan/atau penugasan PNS oleh pejabat yang berwenang, sehingga segala hak PNS atas penugasan tersebut masih melekat pada SKPD tempat asal yang bersangkutan.
- (3) Tambahan penghasilan bagi PNS yang diperbantukan di luar instansi Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (nilai/kelas) jabatan (tidak menerima tambahan penghasilan berdasarkan capaian kinerja dan tambahan penghasilan untuk menunjang mobilitas kerja).

Pasal 14

Bagi PNS yang diperbantukan atau diberi penugasan di luar instansi Pemerintah Kabupaten, yang dalam penugasannya masih melaksanakan tugas pokok dan fungsi di SKPDnya, dapat diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan tingkat kehadiran dan capaian kinerjanya.

Pasal 15

- (1) Terhadap PNS yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain, maka pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada SKPD/Unit Kerja dimaksud.
- (2) Apabila PNS yang mengalami mutasi ke SKPD/Unit Kerja lain dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di SKPD/Unit Kerja yang lama (SKPD/Unit Kerja sebelum mutasi) pada bulan berkenaan, maka pemberian Tambahan Penghasilan dibebankan pada SKPD/Unit Kerja yang lama (SKPD/Unit Kerja sebelum mutasi).
- (3) Tambahan penghasilan terhadap PNS dari instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dilakukan setelah ada Surat Keputusan Bupati dan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Apabila mutasi pegawai dilaksanakan sebelum Surat Keputusan Bupati ditetapkan atau hanya menggunakan Surat Perintah Melaksanakan Tugas, maka pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai yang mutasi tersebut di SKPD/Unit Kerja asal sebelum mutasi.
- (5) Apabila pada SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di SKPD/Unit Kerja tempat bertugas yang baru.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

TPP dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD berikut perubahannya.

Pasal 17

Pemberian TPP dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (nilai/kelas) jabatan dan Tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan b diberlakukan faktor penyeimbang.
- (2) Faktor penyeimbang merupakan angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan dalam pemberian tambahan penghasilan kepada PNS sehingga tambahan penghasilan yang diterima layak sesuai dengan cluster SKPD/beban tugas dan capaian kinerjanya.
- (3) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini
- (4) Cluster SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan beban kerja yang lebih berat dan/atau nilai/kelas jabatan yang lebih tinggi dari jabatan definitifnya.

Pasal 19

- (1) PNS melaksanakan presensi masuk kerja, presensi masuk setelah istirahat siang dan presensi pulang kerja.
- (2) PNS melaksanakan presensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja, presensi masuk setelah istirahat siang setelah istirahat siang, dan presensi pulang kerja setelah jam pulang kerja, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) PNS yang melaksanakan presensi masuk kerja setelah jam masuk kerja dianggap terlambat masuk kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a.
- (4) PNS yang melaksanakan presensi pulang kerja sebelum jam pulang kerja dianggap pulang mendahului jam kerja dan dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (5) PNS yang tidak melakukan presensi masuk setelah istirahat siang dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e.

Pasal 20

- (1) Bagi PNS yang pensiun dan/atau meninggal dunia tetap diberikan tambahan penghasilan pada bulan berkenaan dengan ketentuan:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja atau bobot (nilai/kelas) jabatan dihitung sesuai skor prestasi kehadiran;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kinerja dihitung sesuai nilai capaian kerja sebelum pensiun dan/atau meninggal dunia;
 - c. tambahan penghasilan untuk menunjang mobilitas kerja dihitung sesuai skor aktifitas pegawai.
- (2) Ketidakhadiran PNS setelah pensiun dan/atau meninggal dunia tidak termasuk ketidakhadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga tidak ada pemotongan atau dihitung sebagai hari masuk kerja sampai akhir bulan berkenaan.

- (3) Tambahan Penghasilan bagi PNS yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati Banyuwangi ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 1 April 2019
BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada Tanggal 1 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

TTD

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 16

BOBOT (NILAI/KELAS) JABATAN

I. JABATAN STRUKTURAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	FAKTOR PENYEIMBANG
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	15	3,555	3.70
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan	14	3,030	2.85
3.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	14	3,030	2.85
4.	Asisten Administrasi Umum	14	3,030	2.85
5.	Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan	13	2,715	2.20
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13	2,715	2.20
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan	13	2,715	2.20
8.	Kepala Bagian Pemerintahan	12	2,315	1.92
9.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Kewilayahan	9	1,430	1.60
10.	Kepala Sub Bagian Kerjasama	9	1,430	1.60
11.	Kepala Sub Bagian Pertanahan	9	1,430	1.60
12.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Desa	12	2,315	1.92
13.	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Desa	8	1,295	1.70
14.	Kepala Sub Bagian Aparatur Dan Kelembagaan Desa	9	1,430	1.60
15.	Kepala Bagian Hukum	12	2,315	1.92
16.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan	9	1,430	1.60
17.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9	1,430	1.60
18.	Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi	8	1,295	1.70
19.	Kepala Bagian Organisasi	12	2,315	1.92
20.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9	1,430	1.60
21.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi	9	1,430	1.60
22.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan	8	1,295	1.70
23.	Kepala Bagian Perekonomian	12	2,315	1.92
24.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi	8	1,295	1.70
25.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Ekonomi	8	1,295	1.70
26.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	2,315	1.92
27.	Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan	9	1,430	1.60

28.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	9	1,430	1.60
29.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	12	2,315	1.92
30.	Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan dan Advokasi	9	1,430	1.60
31.	Kasubbag Pengelolaan Barang dan Jasa	8	1,295	1.70
32.	Kasubbag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	8	1,295	1.70
33.	Kepala Bagian Perlengkapan	12	2,315	1.92
34.	Kepala Sub Bagian Pengadaan Kebutuhan	9	1,430	1.60
35.	Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan,Distribusi dan Aset	8	1,295	1.70
36.	Kepala Bagian Umum	12	2,315	1.92
37.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	8	1,295	1.70
38.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9	1,430	1.60
39.	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Keuangan	8	1,295	1.70
40.	Kepala Bagian Humas dan Protokol	12	2,315	1.92
41.	Kepala Sub Bagian Protokol	9	1,430	1.60
42.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pemberitaan	8	1,295	1.70
43.	Kepala Sub Bagian Pelayanan Informasi	8	1,295	1.70
44.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi	14	3,030	2.68
45.	Sekretaris	12	2,140	2.23
46.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.70
47.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
48.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
49.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	11	2,045	1.80
50.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	8	1,295	1.70
51.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan	8	1,295	1.70
52.	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan SDA dan Teknologi	8	1,295	1.70
53.	Kepala Bidang Ekonomi	11	2,045	1.80
54.	Kepala Sub Bidang Pertanian	8	1,295	1.70
55.	Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	8	1,295	1.70
56.	Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Penanaman Modal	8	1,295	1.70
57.	Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	11	2,045	1.80
58.	Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman	9	1,430	1.60

59.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan	8	1,295	1.70
60.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	8	1,295	1.70
61.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan	11	2,045	1.80
62.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan	9	1,430	1.60
63.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya	8	1,295	1.70
64.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan	8	1,295	1.70
65.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	11	2,045	1.80
66.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan	8	1,295	1.70
67.	Kepala Sub Bidang Pengendalian	8	1,295	1.70
68.	Kepala Sub Bidang Evaluasi	9	1,430	1.60
69.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	14	3,030	2.68
70.	Sekretaris	12	2,140	2.23
71.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.70
72.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
73.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
74.	Kepala Bidang Anggaran	11	2,045	1.80
75.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran	9	1,430	1.60
76.	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran	8	1,295	1.70
77.	Kepala Bidang Akuntansi	11	2,045	1.80
78.	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan	9	1,430	1.60
79.	Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja	9	1,430	1.60
80.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan	11	2,045	1.80
81.	Kepala Sub Bidang Penerimaan Keuangan	8	1,295	1.70
82.	Kepala Sub Bidang Pengeluaran Keuangan	9	1,430	1.60
83.	Kepala Bidang Aset	11	2,045	1.80
84.	Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan	8	1,295	1.70
85.	Kepala Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan	9	1,430	1.60
86.	Inspektur	14	3,030	2.68
87.	Sekretaris	12	2,140	2.23
88.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.70
89.	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	8	1,295	1.70
90.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
91.	Inspektur Pembantu Wilayah I	11	1,990	1.76
92.	Inspektur Pembantu Wilayah II	11	1,990	1.76
93.	Inspektur Pembantu Wilayah III	11	1,990	1.76
94.	Kepala Dinas Pendidikan	14	2,865	2.33

95.	Sekretaris	12	2,115	1.90
96.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	9	1,430	1.60
97.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
98.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1,430	1.60
99.	Kepala Bidang Pendidikan SMP	11	2,045	1.80
100.	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	8	1,295	1.70
101.	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SMP	8	1,295	1.70
102.	Kepala Bidang Pendidikan SD	11	2,045	1.80
103.	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	8	1,295	1.70
104.	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan SD	8	1,295	1.70
105.	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini	11	2,045	1.80
106.	Kepala Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini	8	1,295	1.70
107.	Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	8	1,295	1.70
108.	Kepala Bidang Pendidikan Masyarakat	11	2,045	1.80
109.	Kepala Seksi Kesetaraan dan Keaksaraan	8	1,295	1.70
110.	Kepala Seksi Kursus dan Pelatihan	8	1,295	1.70
111.	Kepala Dinas Kesehatan	14	2,865	2.33
112.	Sekretaris	12	2,115	1.90
113.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1,430	1.60
114.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
115.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1,430	1.60
116.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	11	2,045	1.80
117.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	8	1,295	1.70
118.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	8	1,295	1.70
119.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	8	1,295	1.70
120.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	11	2,045	1.80
121.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	9	1,430	1.60
122.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan	8	1,295	1.70
123.	Kepala Seksi Mutu dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9	1,430	1.60
124.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	11	2,045	1.80
125.	Kepala Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	8	1,295	1.70
126.	Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan	8	1,295	1.70
127.	Kepala Seksi SDM Kesehatan	8	1,295	1.70
128.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	11	2,045	1.80
129.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	8	1,295	1.70

130.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	8	1,295	1.70
131.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga	9	1,430	1.60
132.	Direktur RSUD Blambangan	13	2,715	2.20
133.	Direktur RSUD Genteng	12	2,315	1.92
134.	Kepala Bagian Tata Usaha	11	2,090	1.70
135.	Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
136.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	8	1,295	1.70
137.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Program dan Pelaporan	8	1,295	1.70
138.	Kepala Bidang Pelayanan	11	2,045	1.80
139.	Kepala Seksi Pelayanan Medi	8	1,295	1.70
140.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	8	1,295	1.70
141.	Kepala Bidang Penunjang	11	2,045	1.80
142.	Kepala Seksi Penunjang Klinik	8	1,295	1.70
143.	Kepala Seksi Penunjang Non Klinik	8	1,295	1.70
144.	Kepala Bidang Keuangan	11	2,045	1.80
145.	Seksi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	8	1,295	1.70
146.	Seksi Akuntansi	8	1,295	1.70
147.	Kepala UPT	8	1,320	1.30
148.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang	14	2,865	2.33
149.	Sekretaris	12	2,115	1.90
150.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.70
151.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
152.	Kepala Bidang Bina Marga	11	2,045	1.80
153.	Kepala Seksi Jalan	8	1,295	1.70
154.	Kepala Seksi Jembatan	9	1,430	1.60
155.	Kepala Seksi Leger Jalan dan Jembatan	9	1,430	1.60
156.	Kepala Bidang Cipta Karya	11	2,045	1.80
157.	Kepala Seksi Bangunan Gedung	9	1,430	1.60
158.	Kepala Seksi Penataan Lingkungan	9	1,430	1.60
159.	Kepala Seksi Pengendalian Jasa Kontruksi	9	1,430	1.60
160.	Kepala Bidang Penataan Ruang	11	2,045	1.80
161.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	9	1,430	1.60
162.	Kepala Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9	1,430	1.60
163.	Kepala Seksi Pertamanan	9	1,430	1.60
164.	Kepala UPT	8	1,295	1.70
165.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	14	2,865	2.33
166.	Sekretaris	12	2,115	1.90
167.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.70
168.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
169.	Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan	11	2,045	1.80

170.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sumber Daya Air	8	1,295	1.70
171.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Irigasi	9	1,430	1.60
172.	Kepala Seksi Pembangunan dan Pengembangan Air Bersih	8	1,295	1.70
173.	Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan	11	2,045	1.80
174.	Kepala Seksi Operasi	8	1,295	1.70
175.	Kepala Seksi Pemeliharaan	9	1,430	1.60
176.	Kepala Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan	11	2,045	1.80
177.	Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset	8	1,295	1.70
178.	Kepala Seksi Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat	9	1,430	1.60
179.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	2,865	2.33
180.	Sekretaris	12	2,115	1.90
181.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.70
182.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
183.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
184.	Kepala Bidang Kebudayaan	11	2,045	1.80
185.	Kepala Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya	8	1,295	1.70
186.	Kepala Seksi Adat dan Cagar Budaya	8	1,295	1.70
187.	Kepala Bidang Produk Pariwisata	11	2,045	1.80
188.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Destinasi Wisata	8	1,295	1.70
189.	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya dan Usaha Jasa Pariwisata	8	1,295	1.70
190.	Kepala Bidang Pemasaran	11	2,045	1.80
191.	Kepala Seksi Promosi Wisata dan Budaya	8	1,295	1.70
192.	Kepala Seksi Pengembangan Informasi	8	1,295	1.70
193.	Kepala Dinas Pertanian	14	2,865	2.33
194.	Sekretaris	12	2,115	1.90
195.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.70
196.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
197.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
198.	Kepala Bidang Tanaman Pangan	11	2,045	1.80
199.	Kepala Seksi Bina Produksi dan Perlindungan Tanaman	9	1,430	1.60
200.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan	8	1,295	1.70

201.	Kepala Seksi Bina Usaha, Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan Tanaman Pangan	9	1,430	1.60
202.	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura	11	2,045	1.80
203.	Kepala Seksi Perkebunan	8	1,295	1.70
204.	Kepala Seksi Hortikultura	9	1,430	1.60
205.	Kepala Seksi Bina Usaha, Kelembagaan Perkebunan dan Hortikultura	8	1,295	1.70
206.	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	11	2,045	1.80
207.	Kepala Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan	8	1,295	1.70
208.	Kepala Seksi Pengobatan, Pemberantasan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan	8	1,295	1.70
209.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner	8	1,295	1.70
210.	Kepala Bidang Budidaya, Kelembagaan dan Usaha Peternakan	11	2,045	1.80
211.	Kepala Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan	9	1,430	1.60
212.	Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak	8	1,295	1.70
213.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan	8	1,295	1.70
214.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14	2,865	2.33
215.	Sekretaris	12	2,115	1.90
216.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.70
217.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
218.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
219.	Kepala Bidang Perindustrian	11	2,045	1.80
220.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri	8	1,295	1.70
221.	Kepala Seksi Bina Usaha dan Perwilayahan Industri	8	1,295	1.70
222.	Kepala Seksi Standarisasi dan HKI	8	1,295	1.70
223.	Kepala Bidang Pasar	11	2,045	1.80
224.	Kepala Seksi Pengelolaan Pasar	9	1,430	1.60
225.	Kepala Seksi Pembinaan Pasar	8	1,295	1.70
226.	Kepala Bidang Perdagangan	11	2,045	1.80
227.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Daerah	8	1,295	1.70
228.	Kepala Seksi Pengembangan Perdagangan Antar Daerah dan Ekspor Impor	8	1,295	1.70
229.	Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	11	2,045	1.80
230.	Kepala Seksi Metrologi Legal	8	1,295	1.70

231.	Kepala Seksi Bina Konsumen dan Tertib Niaga	8	1,295	1.70
232.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	2,865	2.33
233.	Sekretaris	12	2,115	1.90
234.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.70
235.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.70
236.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.70
237.	Kepala Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal	11	2,045	1.80
238.	Kepala Seksi Kebijakan Penanaman Modal	8	1,295	1.70
239.	Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal	8	1,295	1.70
240.	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	11	2,045	1.80
241.	Kepala Seksi Pelayanan	8	1,295	1.70
242.	Kepala Seksi Penetapan	8	1,295	1.70
243.	Kepala Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal	11	2,045	1.80
244.	Kepala Seksi Data dan Sistem Informasi	8	1,295	1.70
245.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan	8	1,295	1.70
246.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	2,865	2.27
247.	Sekretaris	12	2,115	1.85
248.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.50
249.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.50
250.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
251.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian	11	2,045	1.50
252.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	8	1,295	1.50
253.	Kepala Seksi Analisis dan Standarisasi Pengelolaan Lingkungan	8	1,295	1.50
254.	Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan	9	1,430	1.43
255.	Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi	11	2,045	1.50
256.	Kepala Seksi Konservasi Lingkungan	8	1,295	1.50
257.	Kepala Seksi Rehabilitasi Lingkungan	8	1,295	1.50
258.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas dan Informasi Lingkungan	8	1,295	1.50
259.	Kepala Bidang Kebersihan	11	2,045	1.50
260.	Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan	8	1,295	1.50
261.	Kepala Seksi Pelayanan Sampah	8	1,295	1.50
262.	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B 3)	8	1,295	1.50
263.	Kepala UPT	8	1,320	1.25

264.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	14	2,865	2.27
265.	Sekretaris	12	2,115	1.85
266.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.50
267.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.50
268.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
269.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	2,045	1.50
270.	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak	8	1,295	1.50
271.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	8	1,295	1.50
272.	Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	11	2,045	1.50
273.	Kepala Seksi Keluarga Berencana	8	1,295	1.50
274.	Kepala Seksi Keluarga Sejahtera dan Ketahanan Keluarga	8	1,295	1.50
275.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan	11	2,045	1.50
276.	Kepala Seksi Informasi dan Sinkronisasi Kependudukan	8	1,295	1.50
277.	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	8	1,295	1.50
278.	Kepala Dinas Perhubungan	14	2,865	2.27
279.	Sekretaris	12	2,115	1.85
280.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.50
281.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.50
282.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
283.	Kepala Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Perkeretaapian	11	2,045	1.50
284.	Kepala Seksi Perhubungan Laut	9	1,430	1.43
285.	Kepala Seksi Perhubungan Udara dan Perkeretaapian	9	1,430	1.43
286.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	11	2,045	1.50
287.	Kepala Seksi Angkutan Jalan dan Pengendalian Operasional	8	1,295	1.50
288.	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa dan Sarana Prasarana	9	1,430	1.43
289.	Kepala Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum	11	2,045	1.50
290.	Kepala Seksi Pemeliharaan LPJU	8	1,295	1.50
291.	Kepala Seksi Pembangunan LPJU	8	1,295	1.50
292.	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	14	2,865	2.27
293.	Sekretaris	12	2,115	1.85
294.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.50
295.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.50

296.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
297.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	11	2,045	1.50
298.	Kepala Seksi Kenelayanan	8	1,295	1.50
299.	Kepala Seksi Sarana Penangkapan Ikan dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan	8	1,295	1.50
300.	Kepala Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dan Pusat Pendaratan Ikan	8	1,295	1.50
301.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	11	2,045	1.50
302.	Kepala Seksi Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	8	1,295	1.50
303.	Kepala Seksi Perbenihan Ikan	8	1,295	1.50
304.	Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	8	1,295	1.50
305.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	11	2,045	1.50
306.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan	8	1,295	1.50
307.	Kepala Seksi Distribusi Pangan	8	1,295	1.50
308.	Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	8	1,295	1.50
309.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	14	2,865	2.27
310.	Sekretaris	12	2,115	1.85
311.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.50
312.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
313.	Kepala Bidang Komunikasi	11	2,045	1.50
314.	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Layanan Publik	8	1,295	1.50
315.	Kepala Seksi Komunikasi dan Media Massa	8	1,295	1.50
316.	Kepala Bidang Teknologi Informatika	11	2,045	1.50
317.	Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informatika	9	1,430	1.43
318.	Kepala Seksi Aplikasi dan Tatakelola Teknologi Informatika	8	1,295	1.50
319.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	11	2,045	1.50
320.	Kepala Seksi Statistik	9	1,430	1.43
321.	Kepala Seksi Persandian	9	1,430	1.43
322.	Sekretaris Dewan	14	2,865	2.27
323.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	11	2,090	1.70
324.	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1,295	1.50
325.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
326.	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	11	2,090	1.70
327.	Kepala Sub Bagian Persidangan	8	1,295	1.50
328.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan	8	1,295	1.50
329.	Kepala Bagian Umum	11	2,090	1.70
330.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian	8	1,295	1.50

331.	Kepala Sub Bagian Keprotokolan dan Tata Usaha	8	1,295	1.50
332.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga	14	2,865	2.27
333.	Sekretaris	12	2,115	1.85
334.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.50
335.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
336.	Kepala Bidang Pemuda	11	2,045	1.50
337.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda	8	1,295	1.50
338.	Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan	8	1,295	1.50
339.	Kepala Bidang Olah Raga	11	2,045	1.50
340.	Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga Prestasi	8	1,295	1.50
341.	Kepala Seksi Pengembangan Olah Raga Rekreasi	8	1,295	1.50
342.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga	8	1,295	1.50
343.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	2,865	2.27
344.	Sekretaris	12	2,115	1.85
345.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.50
346.	Kepala Sub Bagian Keuangan	8	1,295	1.50
347.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	8	1,295	1.50
348.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	2,045	1.50
349.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	9	1,430	1.43
350.	Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	8	1,295	1.50
351.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2,045	1.50
352.	Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian	8	1,295	1.50
353.	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Pewarganegaraan	8	1,295	1.50
354.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	2,045	1.50
355.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	8	1,295	1.50
356.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9	1,430	1.43
357.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	2,045	1.50
358.	Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan	8	1,295	1.50
359.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	8	1,295	1.50
360.	Kepala Dinas Sosial	14	2,865	2.27
361.	Sekretaris	12	2,115	1.85

362.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.50
363.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
364.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	11	2,045	1.50
365.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	8	1,295	1.50
366.	Kepala Seksi Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	8	1,295	1.50
367.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial	8	1,295	1.50
368.	Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Bencana	11	2,045	1.50
369.	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial	8	1,295	1.50
370.	Kepala Seksi Penanganan Bencana	8	1,295	1.50
371.	Kepala Seksi Nilai-nilai Kepahlawanan	8	1,295	1.50
372.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	2,865	2.27
373.	Sekretaris	12	2,115	1.85
374.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.50
375.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.50
376.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
377.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	11	2,045	1.50
378.	Kepala Seksi Sumberdaya Aparatur	8	1,295	1.50
379.	Kepala Seksi Operasional, Pengawasan dan Pengendalian	8	1,295	1.50
380.	Kepala Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah	11	2,045	1.50
381.	Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	9	1,430	1.43
382.	Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan	8	1,295	1.50
383.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	11	2,045	1.50
384.	Kepala Seksi Bina Satuan LINMAS	9	1,430	1.43
385.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	9	1,430	1.43
386.	Kepala Bidang Penanggulangan Kebakaran	11	2,045	1.50
387.	Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran	8	1,295	1.50
388.	Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran	8	1,295	1.50
389.	Kepala Badan Pendapatan Daerah	14	2,865	2.27
390.	Sekretaris	12	2,115	1.85
391.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.50
392.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
393.	kepala Bidang Pendataan dan Penetapan	11	2,045	1.50
394.	Kepala Sub Bidang Pendataan, Penilaian PBB P2 dan BPHTB	8	1,295	1.50
395.	Kepala Sub Bidang Pendataan Pajak Daerah Lainnya	8	1,295	1.50
396.	Kepala Sub Bidang Validasi dan Penetapan	8	1,295	1.50
397.	Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	11	2,045	1.50

398.	Kepala Sub Bidang Penagihan PBB P2 dan BPHTB	8	1,295	1.50
399.	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah Lainnya	8	1,295	1.50
400.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan	8	1,295	1.50
401.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	14	2,865	2.27
402.	Sekretaris	12	2,115	1.85
403.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.50
404.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.50
405.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1,430	1.43
406.	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai	11	2,045	1.50
407.	Kepala Sub Bidang Pengadaan Pegawai	8	1,295	1.50
408.	Kepala Sub Bidang Mutasi Pegawai	9	1,430	1.43
409.	Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan	11	2,045	1.50
410.	Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan	8	1,295	1.50
411.	Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional	9	1,430	1.43
412.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data	11	2,045	1.50
413.	Kepala Sub Bidang Pengendalian	8	1,295	1.50
414.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Data	9	1,430	1.43
415.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14	2,865	2.27
416.	Sekretaris	12	2,115	1.85
417.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.50
418.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
419.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	11	2,045	1.50
420.	Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan, Pengupahan dan Jaminan Sosial	8	1,295	1.50
421.	Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	8	1,295	1.50
422.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja	11	2,045	1.50
423.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	9	1,430	1.43
424.	Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja	8	1,295	1.50
425.	Kepala Bidang Transmigrasi	11	2,045	1.50
426.	Kepala Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi	8	1,295	1.50
427.	Kepala Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi	8	1,295	1.50
428.	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	14	2,865	2.27
429.	Sekretaris	12	2,115	1.85
430.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.50
431.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.50
432.	Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi	11	2,045	1.50
433.	Kepala Seksi Organisasi, Akuntabilitas dan Pengawasan Koperasi	9	1,430	1.43

434.	Kepala Seksi Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi	8	1,295	1.50
435.	Kepala Bidang Usaha Koperasi	11	2,045	1.50
436.	Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi	8	1,295	1.50
437.	Kepala Seksi Aneka Usaha Koperasi	8	1,295	1.50
438.	Kepala Bidang Usaha Mikro	11	2,045	1.50
439.	Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	8	1,295	1.50
440.	Kepala Seksi Peningkatan Usaha Mikro	8	1,295	1.50
441.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14	2,865	2.21
442.	Sekretaris	12	2,115	1.80
443.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.35
444.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.35
445.	Kepala Bidang Perumahan	11	2,045	1.45
446.	Kepala Seksi Pengendalian Perumahan	8	1,295	1.35
447.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Relokasi Rumah	8	1,295	1.35
448.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	11	2,045	1.45
449.	Kepala Seksi PSU dan Rumah Susun	8	1,295	1.35
450.	Kepala Seksi Kawasan Kumuh	8	1,295	1.35
451.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	2,865	2.21
452.	Sekretaris	12	2,115	1.80
453.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.35
454.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.35
455.	Kepala Bidang Bina Ideologi Pembauran dan Wawasan Kebangsaan	11	2,045	1.45
456.	Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Pembauran	8	1,295	1.35
457.	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	8	1,295	1.35
458.	Kepala Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik	11	2,045	1.45
459.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan	8	1,295	1.35
460.	Kepala Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan konflik	8	1,295	1.35
461.	Kepala Bidang Budaya Politik dan HAM	11	2,045	1.45
462.	Kepala Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan	8	1,295	1.35
463.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM	8	1,295	1.35
464.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	2,865	2.21
465.	Sekretaris	12	2,115	1.80
466.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.35
467.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.35
468.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan	8	1,295	1.35

469.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	11	2,045	1.45
470.	Kepala Seksi Pencegahan	8	1,295	1.35
471.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	8	1,295	1.35
472.	Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik	11	2,045	1.45
473.	Kepala Seksi Kedaruratan	8	1,295	1.35
474.	Kepala Seksi logistik	8	1,295	1.35
475.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	11	2,045	1.45
476.	Kepala Seksi Rehabilitasi	8	1,295	1.35
477.	Kepala Seksi Rekonstruksi	8	1,295	1.35
478.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	2,865	2.21
479.	Sekretariat	12	2,115	1.80
480.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.35
481.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.35
482.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan	11	2,045	1.45
483.	Kepala Seksi Kerjasama Usaha Ekonomi Desa	8	1,295	1.35
484.	Kepala Seksi Penguatan Usaha Ekonomi Desa	8	1,295	1.35
485.	Kepala Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	8	1,295	1.35
486.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya	11	2,045	1.45
487.	Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	8	1,295	1.35
488.	Kepala Seksi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa	8	1,295	1.35
489.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Sosial Budaya	8	1,295	1.35
490.	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa	11	2,045	1.45
491.	Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa	8	1,295	1.35
492.	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa	8	1,295	1.35
493.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Lembaga Desa	8	1,295	1.35
494.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14	2,865	2.21
495.	Sekretariat	12	2,115	1.80
496.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	8	1,295	1.35
497.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	8	1,295	1.35
498.	Bidang Perpustakaan	11	2,045	1.45
499.	Kepala Seksi Pembinaan dan Layanan Perpustakaan	9	1,430	1.28
500.	Kepala Seksi Pelestarian Bahan Pustaka	8	1,295	1.35
501.	Bidang Kearsipan	11	2,045	1.45

502.	Kepala Seksi Pengolahan dan Layanan Arsip	8	1,295	1.35
503.	Kepala Seksi Penataan dan Penyelamatan Arsip	8	1,295	1.35
504.	CAMAT	12	2,315	2.00
505.	Sekretaris	11	2,090	1.40
506.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	8	1,295	1.21
507.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	8	1,295	1.21
508.	Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat	8	1,320	1.25
509.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	8	1,320	1.25
510.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Ketertiban Umum	8	1,320	1.25
511.	Lurah	9	1,540	1.65
512.	Sekretaris	8	1,320	1.20
513.	Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban	8	1,295	1.15
514.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat	8	1,295	1.15

II. JABATAN PELAKSANA DAN FUNGSIONAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI JABATAN	POIN PENYEIMBANG
1	2	3	4	5
	SEKRETARIAT DAERAH			
	Bagian Hukum			
1	Analisis Produk Hukum	7	890	1.20
2	Analisis Advokasi Hukum	7	890	1.20
3	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
4	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
5	Pengadministrasian Keuangan	5	490	1.20
6	Pengolah Data Informasi dan Hukum	6	690	1.15
7	Pengelola Surat	6	690	1.15
8	Pengadministrasian Hukum	5	490	1.20
9	Pengadministrasian Data Peraturan Perundang - Undangan	5	490	1.20
10	Pengadministrasian Umum	5	490	1.20
11	Pengadministrasian Persuratan	5	490	1.20
12	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490	1.20
13	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bagian Pemerintahan			
14	Analisis Pertanahan	7	890	1.20
15	Pengelola Pertanahan	6	690	1.15
16	Analisis Pengembangan Wilayah	7	890	1.20
17	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	7	890	1.20

18	Analisis Batas Wilayah	7	890	1.20
19	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	7	890	1.20
20	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
21	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
22	Pengelola Penyelenggaraan Otonomi Daerah	6	690	1.15
23	Pengelola Informasi Kerjasama	6	690	1.15
24	Pengadministrasian Otonomi Daerah	5	490	1.20
25	Pengadministrasian Pemerintahan	5	490	1.20
26	Pengadministrasian Keuangan	5	490	1.20
27	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490	1.20
28	Pengadministrasian Umum	5	490	1.20
29	Pengadministrasian Persuratan	5	490	1.20
30	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bagian Organisasi			
31	Analisis Kelembagaan	7	890	1.20
32	Analisis Jabatan	7	890	1.20
33	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7	890	1.20
34	Analisis Kinerja	7	890	1.20
35	Analisis Kompetensi	7	890	1.20
36	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
37	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
38	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7	890	1.15
39	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	7	890	1.15
40	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690	1.15
41	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690	1.15
42	Pengelola Tata Naskah	6	690	1.15
43	Pengelola Pengaduan Publik	6	690	1.15
44	Pengelola Data	6	690	1.15
45	Pengadministrasian Keuangan	5	490	1.20
46	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490	1.20
47	Pengadministrasian Umum	5	490	1.20
48	Pengadministrasian Persuratan	5	490	1.20
49	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bagian Tata Pemerintahan Desa			
50	Analisis Kelembagaan	7	890	1.20
51	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7	890	1.20
52	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890	1.20
53	Analisis Desa	7	890	1.20
54	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
55	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
56	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6	690	1.15
57	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6	690	1.15

58	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	6	690	1.15
59	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
60	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
61	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
62	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
63	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bagian Perekonomian			
64	Analisis Perekonomian	7	890	1.20
65	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
66	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
67	Pengolah Data Kinerja Investasi, Penerusan Pinjaman Dan Kredit Program	6	690	1.15
68	Pengolah Data Kebijakan Ekonomi Makro	6	690	1.15
69	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	6	690	1.15
70	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah	6	690	1.15
71	Pengelola Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha Daerah	6	690	1.15
72	Pengelola Ketahanan Pangan	6	690	1.15
73	Pengelola Produksi	6	690	1.15
74	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
75	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
76	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
77	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
78	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bagian Kesejahteraan Rakyat			
79	Analisis Sarana Prasarana Ibadah	7	890	1.20
80	Analisis Kelembagaan Masyarakat	7	890	1.20
81	Analisis Masalah Sosial	7	890	1.20
82	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
83	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
84	Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat	7	890	1.15
85	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	1.15
86	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
87	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
88	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
89	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
90	Pramu Bakti	1	190	1.80
91	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa			
92	Analisis Pembangunan	7	890	1.20
93	Analisis Advokasi Hukum	7	890	1.20

93	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	1.20
94	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
95	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
96	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	690	1.15
97	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	690	1.15
98	Pranata Barang dan Jasa	6	690	1.15
99	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	690	1.15
100	Pengelola Data	6	690	1.15
101	Pengadministrasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5	490	1.20
102	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
103	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
104	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
105	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
106	Pengemudi	3	340	1.40
107	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
108	Pramu Bakti	1	190	1.80
	Bagian Perlengkapan			
109	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	890	1.15
110	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
111	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
112	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
113	Pranata Barang dan Jasa	6	690	1.15
114	Pengelola Data	6	690	1.15
115	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
116	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
117	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
118	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
119	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bagian Umum			
120	Analisis Tata Usaha	7	890	1.15
121	Bendahara	6	690	1.50
122	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
123	Penata Keuangan	7	890	1.15
124	Pengelola Gaji	6	690	1.15
125	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
126	Sekretaris	6	690	1.15
127	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	890	1.15
128	Penyusun Laporan Keuangan	7	890	1.15
129	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.15
130	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	890	1.15

131	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690	1.15
132	Pengelola Surat	6	690	1.15
133	Pengelola Kendaraan	6	690	1.15
134	Pengelola Instalasi Air dan Listrik	6	690	1.15
135	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	6	690	1.15
136	Verifikator Keuangan	6	690	1.15
137	Pengolah Data Sistem Akuntansi	6	690	1.15
138	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
139	Teknisi Elektronik	6	690	1.15
140	Teknisi Peralatan Kantor	6	690	1.15
141	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
142	Operator Telekomunikasi	6	690	1.15
143	Pranata Jamuan	6	690	1.15
144	Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor	5	490	1.20
145	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490	1.20
146	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
147	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
148	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
149	Pengemudi	3	340	1.40
150	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
151	Pramu Taman	1	190	1.80
	Bagian Humas Dan Protokol			
152	Analisis Publikasi	7	890	1.20
153	Penyusun Naskah	7	890	1.15
154	Penyusun Berita dan Pendapat Umum	7	890	1.15
155	Analisis Protokol	7	890	1.40
156	Analisis Tata Usaha	7	890	1.15
157	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
158	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
159	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	6	690	1.15
160	Pengolah Informasi media	6	690	1.15
161	Pengelola Tata Naskah Dinas	6	690	1.15
162	Pengelola Dokumentasi	6	690	1.15
163	Pranata Acara	6	690	1.15
164	Petugas Protokol	6	690	1.15
165	Penata Peliputan	6	690	1.15
166	Jurnalis	6	690	1.15
167	Pengadministrasi Anggaran	5	490	1.20
168	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
169	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
170	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20

171	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
172	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Sekretariat			
173	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890	1.20
174	Bendahara	6	690	1.50
175	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
176	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
177	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
178	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.15
179	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.15
180	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690	1.15
181	Pranata Kearsipan	6	690	1.15
182	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
183	Sekretaris	6	690	1.15
184	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
185	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
186	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
187	Petugas Keamanan	3	340	1.40
188	Pengemudi	3	340	1.40
189	Pramu Bakti	1	190	1.80
190	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bidang Ekonomi			
191	Analisis Perencanaan	7	890	1.20
192	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.15
193	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.15
194	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
195	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
	Bidang Perencanaan Pengendalian & Evaluasi			
196	Analisis Perencanaan	7	890	1.20
197	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	1.20
197	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan	6	690	1.15
198	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
198	Pengadministrasi Program dan Tata Operasional Penelitian	5	490	1.20
199	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
	Bidang Penelitian dan Pengembangan			
200	Analisis Perencanaan	7	890	1.20
201	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	890	1.20
202	Penyusun Penelitian dan Pengembangan	7	890	1.15
203	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1.15
204	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
205	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	5	490	1.20

206	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
	Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan			
207	Analisis Perencanaan	7	890	1.20
208	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.15
209	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.15
210	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
211	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
	Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup			
212	Analisis Tata Ruang	7	890	1.20
213	Analisis Pengembangan Wilayah	7	890	1.20
214	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	890	1.15
215	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.15
216	Pengelola Sarana Prasarana Sumber Daya Alam	6	690	1.15
217	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
218	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490	1.20
219	Varifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
	Jabatan Fungsional			
220	JF Perencana Madya	8	1280	3.13
221	JF Perencana Muda	8	1340	2.36
222	JF Perencana Pertama	8	1265	1.71
223	JF Statistik Terampil	6	740	1.57
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	Sekretariat			
224	Bendahara	6	690	1.50
225	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.15
226	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1.15
227	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
228	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
229	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
230	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
231	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
232	Pengemudi	3	340	1.40
233	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
234	Petugas Keamanan	3	340	1.40
	Bidang Anggaran			
235	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran	7	890	1.20
236	Analisis Penyusunan APBD	7	890	1.20
237	Verifikator Anggaran	6	690	1.15
238	Pengelola Anggaran	6	690	1.15
239	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15

240	Pengadministrasi Anggaran	5	490	1.20
241	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Akuntansi			
242	Analisis Laporan Keuangan Daerah	7	890	1.20
243	Analisis Bimbingan Akuntansi	7	890	1.20
244	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	890	1.20
245	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
246	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Pengelolaan Keuangan			
247	Analisis Perbendaharaan	7	890	1.20
248	Bendahara	6	690	1.50
249	Verifikasi Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
250	Pengelola Perbendaharaan dan Pelayanan	6	690	1.15
251	Pengelola Data Pencairan Dana	6	690	1.15
252	Pengolah Data Laporan Kas	6	690	1.15
253	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Aset			
254	Analisis Aset Daerah	7	890	1.20
255	Pengolah Data Pengelolaan Kekayaan Daerah	6	690	1.15
256	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
257	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	INSPEKTORAT			
	Sekretariat			
258	Bendahara	6	690	1.50
259	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
260	Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	6	690	1.15
261	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
262	Pengadministrasi Perencanaan	5	490	1.20
263	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
264	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
265	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
266	Pengolah Daftar gaji	6	690	1.15
267	Petugas Keamanan	3	340	1.40
268	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
269	Pengemudi	3	340	1.40
270	Pramu Bakti	1	190	1.80
	Jabatan Fungsional			
271	JF Auditor Ahli Madya	11	1930	2.40
272	JF Auditor Ahli Muda	9	1355	2.23
273	JF Auditor Ahli Pertama	8	1280	1.71
274	JF Auditor Penyelia	8	1230	1.23
275	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1005	1.37
276	JF Auditor Pelaksana	6	740	1.57

277	JF Pengawas Pemerintahan Madya	11	1930	2.40
278	JF Pengawas Pemerintahan Muda	9	1355	2.23
279	JF Pengawas Pemerintahan Pertama	8	1280	1.71
	DINAS PENDIDIKAN			
	Sekretariat			
280	Analisis Pengawas Pendidikan	7	890	1.20
281	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	1.20
282	Bendahara	6	690	1.50
283	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
284	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890	1.15
285	Penyusun Program Sertifikasi Pendidik	7	890	1.15
286	Penyusun Program Fasilitasi Pendidikan	7	890	1.15
287	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690	1.15
288	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.15
289	Pengelola Pengembangan Karir	6	690	1.15
290	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690	1.15
291	Pengelola Bantuan Pendidikan	6	690	1.15
292	Pengelola Gaji	6	690	1.15
293	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
294	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
295	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
296	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
297	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
298	Pengemudi	3	340	1.40
299	Petugas Keamanan	3	340	1.40
300	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
301	Pramu Bakti	1	190	1.80
	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini			
302	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
303	Pengelola Kelembagaan Pendidikan	6	690	1.15
304	Pengelola Pemetaan Mutu Pendidik	6	690	1.15
305	Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	6	690	1.15
306	Pengelola Pembinaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	6	690	1.15
	Bidang Pendidikan Sekolah Dasar			
307	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
308	Pengembang Mutu Akademik	7	890	1.15
309	Pengelola Pemetaan Mutu Pendidikan	6	690	1.15
310	Pengelola Saran dan Prasarana Pendidikan	6	690	1.15
311	Pengelola Pendidikan dan Evaluasi	6	690	1.15
	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
312	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
313	Pengembang Mutu Akademik	7	890	1.15
314	Pengelola Pemetaan Mutu Pendidikan	6	690	1.15

315	Pengelola Saran dan Prasarana Pendidikan	6	690	1.15
316	Pengelola Pendidikan dan Evaluasi	6	690	1.15
	Bidang Pendidikan Masyarakat			
317	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
318	Pengelola Pendidikan dan Evaluasi	6	690	1.15
319	Pengelola Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	690	1.15
	Satuan Pendidikan			
320	Pengelola Laboratorium	6	690	1.15
321	Pengelola Perpustakaan	6	690	1.15
322	Pengelola Gaji	6	690	1.15
323	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
324	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
325	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	490	1.20
326	Petugas Keamanan	3	340	1.40
327	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
328	Pramu Bakti	1	190	1.80
	Jabatan Fungsional			
329	JF Guru Madya	11	1960	1
330	JF Guru Muda	9	1385	1
331	JF Guru Pertama	8	1280	1
332	JF Pengawas Sekolah Utama	13	2585	1
333	JF Pengawas Sekolah Madya	11	1960	1
334	JF Pengawas Sekolah Muda	9	1385	1
335	JF Pengawas Sekolah Pertama	8	1310	1
336	JF Penilik Madya	11	1930	1
337	JF Penilik Muda	9	1355	1
338	JF Penilik Pertama	8	1280	1
339	JF Penilik Terampil	7	1070	1
340	JF Analis Kepegawaian Pertama	8	1280	1.13
	DINAS KESEHATAN			
	Sekretariat			
341	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	1.20
342	Analisis Sistem Informasi	7	890	1.20
343	Analisis Kinerja	7	890	1.20
344	Bendahara	6	690	1.50
345	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
346	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
347	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.15
348	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7	890	1.15
349	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690	1.15
350	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
351	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
352	Pramu Bakti	1	190	1.80
353	Pengemudi	3	340	1.40

354	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bidang Kesehatan Masyarakat			
355	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	7	890	1.20
356	Analisis Gizi	7	890	1.20
357	Analisis Kesehatan Kerja	7	890	1.20
358	Analisis Obat dan Makanan	7	890	1.20
359	Pengolah Data	6	690	1.15
360	Pengelola Program Gizi	6	690	1.15
361	Pengelola Program Kesehatan Keluarga	6	690	1.15
362	Pengelola Penggerak peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan	6	690	1.15
363	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Pelayanan Kesehatan			
364	Analisis Kesehatan	7	890	1.20
365	Inspektur Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	7	890	1.15
366	Penelaah Sistem Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Laboratorium Medik	7	890	1.15
367	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	690	1.15
368	Pengelola Program Rujukan	6	690	1.15
369	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Sumber Daya Kesehatan			
370	Analisis Pembayar Jaminan Kesehatan	7	890	1.20
371	Penyusun Teknis Pelatihan Fungsional Bagi Aparatur dan Non Aparatur	7	890	1.15
372	Pengelola Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	6	690	1.15
373	Pengelola Data	6	690	1.15
374	Pengelola Data Pembayaran Jaminan Kesehatan	6	690	1.15
375	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
376	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490	1.20
377	Pengelola Kefarmasian	6	690	1.15
378	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6	690	1.15
379	Pengelola Profesi Sumber Daya Manusia	6	690	1.15
380	Pranata Diklat	6	690	1.15
	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
381	Analisis Penyakit Menular	7	890	1.20
382	Pengelola Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang	6	690	1.15
383	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6	690	1.15
384	Pengelola Penyakit Tidak Menular	6	690	1.15
385	Pengelola Program Imunisasi	6	690	1.15
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)			
	a. Tata Usaha / Operasional / Keuangan			
386	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	890	1.15
387	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690	1.15

388	Pengelola Program dan Laporan	6	690	1.15
389	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
390	Pengadministrasi Sarana dan Prasaran Kantor	5	490	1.20
391	Pengelola Pengaduan Publik	6	690	1.15
392	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.15
393	Pengelola Surat	6	690	1.15
394	Pengelola Data	6	690	1.15
395	Pengolah Data Pelayanan	6	690	1.15
396	Pengolah makanan	6	690	1.15
397	Pengolah Data Jaminan Kesehatan	6	690	1.15
398	Juru Rawat Jenazah	5	490	1.20
399	Binatu Rumah Sakit	5	490	1.20
400	Petugas Kamar Gelap	5	490	1.20
401	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
402	Pengadministrasi Saran dan Prasarana	5	490	1.20
403	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
404	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
405	Pengemudi Ambulan	5	490	1.20
406	Pengemudi	3	340	1.40
407	Pranata Taman	5	490	1.20
408	Petugas Keamanan	3	340	1.40
409	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
410	Bendahara	6	690	1.50
411	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
412	Penyusun Laporan Keuangan	7	890	1.15
413	Pengelola Gaji	6	690	1.15
414	Pengolah Data Sistem Akutansi	6	690	1.15
415	Pengolah Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
416	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690	1.15
417	Pengelola Keuangan	6	690	1.15
418	Pengelola Laporan Keuangan	6	690	1.15
419	Pengadministrasi Penerimaan	5	490	1.20
420	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
	b. Pelayanan			
421	Pengolah Data	6	690	1.15
422	Pengelola Keperawatan	6	690	1.15
423	Pengelola Kebidanan	6	690	1.15
424	Pengelola Kefarmasian	6	690	1.15
425	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6	690	1.15
426	Pengelola Obat dan Alat-alat Kesehatan	6	690	1.15
427	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490	1.20
428	Teknisi Sarana dan Prasaran	6	690	1.15
429	Pengadministrasi Gudang Farmasi	5	490	1.20
430	Pengadministrasi Rekam Medis dan Informasi	5	490	1.20

	UPT Laboratorium Kesehatan			
431	Pengelola Laboratorium Kimia	6	690	1.15
432	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
433	Petugas Pengambil Contoh	5	490	1.20
434	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
435	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
436	Pengemudi	3	340	1.40
437	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	UPT Puskesmas			
438	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
439	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
440	Pengelola Sistem Informasi	6	690	1.15
441	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	6	690	1.15
442	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
443	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
444	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
445	Pengemudi	3	340	1.40
446	Petugas Keamanan	3	340	1.40
447	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Jabatan Fungsional			
448	JF Dokter Madya	12	2295	1.66
449	JF Dokter Muda	10	1670	1.43
450	JF Dokter Pertama	9	1370	1.05
451	JF Dokter Madya Spesialis	13	2430	1.57
452	JF Dokter Muda Spesialis	11	1950	1.30
453	JF Dokter Pertama Spesialis	9	1370	1.05
454	JF Gigi Dokter Utama	14	2805	1.61
455	JF Gigi Dokter Madya	12	2225	1.68
456	JF Gigi Dokter Muda	10	1670	1.43
457	JF Gigi Dokter Pertama	9	1370	1.05
458	JF Apoteker Madya	11	1945	1.83
459	JF Apoteker Muda	9	1370	1.59
460	JF Apoteker Pertama	8	1295	1.13
461	JF Asisten Apoteker Penyelia	8	1245	1.04
462	JF Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	1020	1.12
463	JF Asisten Apoteker Pelaksana	6	755	1.13
464	JF Asisten Apoteker Pelaksana Pemula	5	505	1.19
465	JF Perawat Madya	11	1960	1.82
466	JF Perawat Muda	9	1385	1.58
467	JF Perawat Pertama	8	1310	1.13
468	JF Perawat Penyelia	8	1260	1.04
469	JF Perawat Mahir	7	1035	1.11
470	JF Perawat Terampil	6	770	1.13
471	JF Perawat Gigi Penyelia	8	1245	1.04
472	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	7	1020	1.12

473	JF Perawat Gigi Pelaksana	6	770	1.13
474	JF Perawat Gigi Pelaksana Pemula	5	520	1.19
475	JF Perekam Medis Penyelia	8	1245	1.04
476	JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan	7	1020	1.12
477	JF Perekam Medis Pelaksana	6	770	1.13
478	JF Bidan Muda	9	1355	1.59
479	JF Bidan Pertama	8	1280	1.13
480	JF Bidan Penyelia	8	1230	1.05
481	JF Bidan Pelaksana Lanjutan	7	1005	1.12
482	JF Bidan Pelaksana	6	740	1.13
483	JF Bidan Pelaksana Pemula	5	540	1.18
484	JF Psikologis Klinis Muda	9	1370	1.59
485	JF Psikologis Klinis Pertama	8	1295	1.13
486	JF Entomolog Kesehatan Penyelia	8	1230	1.05
487	JF Entomolog Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	1005	1.12
488	JF Entomolog Kesehatan Pelaksana	6	740	1.13
489	JF Fisiotherapi Penyelia	8	1230	1.05
490	JF Fisiotherapi Pelaksana Lanjutan	7	1005	1.12
491	JF Fisiotherapi Pelaksana	6	740	1.13
492	JF Nutrisionis Penyelia	8	1230	1.05
493	JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan	7	1005	1.12
494	JF Nutrisionis Pelaksana	6	740	1.13
495	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama	8	1310	1.13
496	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia	8	1260	1.04
497	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana Lanjutan	7	1035	1.11
498	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pelaksana	6	770	1.13
499	JF Radiografer Penyelia	8	1245	1.04
500	JF Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	1020	1.12
501	JF Radiografer Pelaksana	6	770	1.13
502	JF Sanitarian Pertama	8	1280	1.13
503	JF Sanitarian Penyelia	8	1230	1.05
504	JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	1005	1.12
505	JF Sanitarian Pelaksana	6	755	1.13
506	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	1020	1.12
507	JF Teknisi Elektromedis Pelaksana	6	770	1.13
508	JF Teknisi Gigi Pelaksana	6	770	1.13
509	JF Pranata Lab. Kesehatan Penyelia	8	1215	1.05
510	JF Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	990	1.12
511	JF Pranata Lab. Kesehatan Pelaksana	6	740	1.13
512	JF Administrator Kesehatan Pertama	8	1280	0.80
	DINAS PEKERJAAN UMUM, CIPTA KARYA DAN PENATAAN RUANG			
	Sekretariat			
513	Bendahara	6	690	1.50
514	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48

515	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.15
516	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.15
517	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan APBD	6	690	1.15
518	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
519	Pengelola Gaji	6	690	1.15
520	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
521	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
522	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
523	Pramu Bakti	1	190	1.80
524	Sekretaris	6	690	1.15
525	Petugas Keamanan	3	340	1.40
526	Pengemudi	3	340	1.40
	Bidang Bina Marga			
527	Analisis Jalan Jembatan	7	890	1.20
528	Verifikasi Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
529	Penelaah Mutu Konstruksi	7	890	1.15
530	Penelaah Pengelolaan Leger Jalan	7	890	1.15
531	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890	1.15
532	Operator Alat Berat	6	690	1.15
533	Penilik Jalan	6	690	1.15
534	Pengelola Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	6	690	1.15
535	Pengelola Pembangunan dan Peningkatan Jalan	6	690	1.15
536	Pengelola Pemeliharaan Jalan	6	690	1.15
537	Pranata Pengelolaan Leger Jalan	6	690	1.15
538	Pemelihara Peralatan	6	690	1.15
539	Pengadministrasi Batas Wilayah	5	490	1.20
540	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Cipta Karya			
541	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	890	1.20
542	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
543	Teknisi Gedung/Bangunan	6	690	1.15
544	Teknisi Keciaptakaryaan	6	690	1.15
545	Teknisi Rancang Bangun	6	690	1.15
546	Pengawas Bangunan dan Gedung	7	890	1.15
547	Pengelola Jasa Konstruksi	6	690	1.15
548	Pengelola Perencanaan Teknisi Tata Bangunan	6	690	1.15
549	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Penataan Ruang			
550	Analisis Pemanfaatan Ruang	7	890	1.20
551	Analisis Tata Ruang	7	890	1.20
552	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
553	Penyusun Rencana Tata Ruang	7	890	1.15
554	Pengawas Bangunan dan Taman	7	890	1.15
555	Pengawas Tata Pertamanan	7	890	1.15

556	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6	690	1.15
557	Pengelola Tata Ruang	6	690	1.15
558	Pengelola Tata Ruang dan Tata Guna Bangunan	6	690	1.15
559	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	UPT Pengelolaan Jalan / UPT Laboratorium Pengujian Konstruksi			
560	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
561	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	890	1.15
562	Pengawas Bangunan dan Taman	7	890	1.15
563	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal, dan Beton	7	890	1.15
564	Pengadministrasian Umum	5	490	1.20
	Jabatan Fungsional			
565	JF Pembina Jasa Konstruksi Pertama	8	1325	1.12
566	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	8	1325	1.12
567	JF Teknik Jalan dan Jembatan Pertama	8	1310	1.13
568	JF Penata Ruang Pertama	8	1280	1.13
	DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN			
	Sekretariat			
569	Analisis Perencanaan Program	7	890	1.20
570	Bendahara	6	690	1.50
571	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
572	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
573	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
574	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1.15
575	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.15
576	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690	1.15
577	Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	6	690	1.15
578	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.15
579	Pengelola Surat	6	690	1.15
580	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.15
581	Sekretaris	6	690	1.15
582	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
583	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
584	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
585	Pengemudi	3	340	1.40
586	Petugas Keamanan	3	340	1.40
587	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bidang Pembangunan dan Pengembangan			
588	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7	890	1.20
589	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	890	1.20
590	Analisis Sumber Daya Air	7	890	1.20
591	Teknisi Air	6	690	1.15
592	Pemeriksa Sektor Sumber Daya Air	7	890	1.15
593	Pemeriksa Irigasi	7	890	1.15

594	Pengawas Irigasi	7	890	1.15
595	Penelaah Mutu Konstruksi	7	890	1.15
596	Pengelola Mutu	6	690	1.15
597	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690	1.15
598	Pengelola Pengguna dan Pengendali Pemanfaatan Sumber Daya Air	6	690	1.15
599	Pengelola Sumber Daya Air	6	690	1.15
600	Pengelola Geologi, Tata Lingkungan dan Air Bawah Tanah	6	690	1.15
601	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6	690	1.15
602	Pemelihara Sarana dan Prasarana	5	490	1.20
603	Pengadministrasi Perizinan	5	490	1.20
	Bidang Operasi dan Pemeliharaan			
604	Penyusun Rencana Tata Tanam	7	890	1.15
605	Pengawas Pengairan	7	890	1.15
606	Pengawas Irigasi	7	890	1.15
607	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan	7	890	1.15
608	Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	690	1.15
609	Penjaga Pintu Air	6	690	1.15
610	Pengelola Dokumentasi	6	690	1.15
611	Pengolah Sarana dan Prasarana Pengairan	6	690	1.15
612	Pengelola Pengendali dan Operasional	6	690	1.15
613	Pengelola Irigasi	6	690	1.15
614	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6	690	1.15
615	Petugas Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	690	1.15
616	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
617	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
618	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan			
619	Penyusun Bahan Kerjasama Pelatihan	7	890	1.15
620	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Investasi Aset Daerah	6	690	1.15
621	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Air	6	690	1.15
622	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6	690	1.15
623	Pengelola Dokumentasi	6	690	1.15
624	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Jabatan Fungsional			
625	JF Teknik Pengairan Pertama	8	1310	1.13
	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			
	Sekretariat			
626	Pengadministrasian Umum	5	490	1.20
627	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490	1.20
628	Pengelola Database	6	690	1.15
629	Pengemudi	3	340	1.40
630	Pengadministrasian Persuratan	5	490	1.20

631	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
632	Petugas Keamanan	3	340	1.40
633	Bendahara	6	690	1.50
634	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
635	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
636	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.15
637	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890	1.20
638	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.15
	Bidang Kebudayaan			
639	Pengelola Adat dan Kesenian	6	690	1.15
640	pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
641	Pengelola Cagar Budaya dan Koleksi Museum	6	690	1.15
642	Pengadministrasi Kesenian dan Budaya Daerah	5	490	1.20
	Bidang Produk Pariwisata			
643	Pengelola Usaha Kepariwisata	6	690	1.15
644	Pengelola Informasi Kepariwisata	6	690	1.15
645	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
	Bidang Pemasaran			
646	Pemandu Wisata	6	690	1.15
647	Pengelola Promosi Dan Informasi Wisata	6	690	1.15
648	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
649	Pengolah Usaha Pemasaran dan Promosi Wisata	6	690	1.15
	DINAS PERTANIAN			
	Sekretariat			
650	Analisis Pelaksanaan Proyek Pemerintah	7	890	1.20
651	Bendahara	6	690	1.50
652	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
653	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
654	Pengelola Akuntansi	6	690	1.15
655	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.15
656	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
657	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
658	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
659	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
660	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690	1.15
661	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1.15
662	Petugas Keamanan	3	340	1.40
663	Pengemudi	3	340	1.40
664	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
665	Pengelola Gaji	6	690	1.15
	Bidang Tanaman Pangan			
666	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis	7	890	1.20
667	Analisis Program Pembangunan Pertanian	7	890	1.20
668	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	7	890	1.20

669	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
670	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	6	690	1.15
671	Pengelola Lahan Pertanian	6	690	1.15
672	Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan	6	690	1.15
673	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	6	690	1.15
674	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	6	690	1.15
675	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	6	690	1.15
676	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	6	690	1.15
677	Pengelolaan Tata Guna Lahan, air, Sarana dan Prasarana Pertanian	6	690	1.15
678	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Perkebunan dan Hortikultura			
679	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agribisnis	7	890	1.20
680	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan	6	690	1.15
681	Pengadministrasi Sertifikasi Perlindungan Varietas Tanaman	5	490	1.20
682	Pengelola Kelembagaan Kursus dan Pelatihan	6	690	1.15
683	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
684	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
685	Pengelola dan Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan Serta Sayuran	6	690	1.15
	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
686	Bendahara	6	690	1.50
687	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
688	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	7	890	1.15
689	Pengawas Lalu Lintas Hewan dan Wilayah Karantina Hewan	7	890	1.15
690	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	690	1.15
691	Pengelola Kesehatan Ternak Besar, Kecil dan Unggas	6	690	1.15
692	Pengelola Rumah Potong Hewan	6	690	1.15
693	Pengelola Lalu Lintas Ternak dan Izin Budi Daya Ternak	6	690	1.15
694	Pengelola Laboratorium	6	690	1.15
695	Pengolah Data	6	690	1.15
	Bidang Budidaya, Kelembagaan dan Usaha Peternakan			
696	Analisis Pakan Ternak	7	890	1.20
697	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
698	Pengawas Mutu Bibit Ternak	7	890	1.15
699	Pengelola Budidaya Pengembangan Ternak dan Hewan lainnya	6	690	1.15
700	Pengelola Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6	690	1.15

701	Pengelola Usaha Tani Peternakan dan Kehewanan	6	690	1.15
702	Pengadministrasi umum	5	490	1.20
	Jabatan Fungsional			
703	JF Medik Veteriner Pertama	8	1280	1.13
704	JF Paramedik Veteriner Pelaksana	6	740	1.13
705	JF Penyuluh Pertanian Utama	13	2685	1.69
706	JF Penyuluh Pertanian Madya	11	2030	1.80
707	JF Penyuluh Pertanian Muda	9	1385	1.58
708	JF Penyuluh Pertanian Pertama	8	1310	1.13
709	JF Penyuluh Pertanian Penyelia	8	1260	1.04
710	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan	7	1035	1.11
711	JF Penyuluh Pertanian Pelaksana	6	770	1.13
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
	Sekretariat			
712	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	1.20
713	Analisis Sistem Informasi	7	890	1.20
714	Bendahara	6	690	1.50
715	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
716	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
717	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.15
718	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890	1.15
719	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.15
720	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.20
721	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
722	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
723	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
724	Pengemudi	3	340	1.40
725	Petugas Keamanan	3	340	1.40
726	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
	Bidang Perindustrian			
727	Analisis Industri	7	890	1.20
728	Analisis Inspeksi Bahan dan Barang Teknik Non Logam	7	890	1.20
729	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri	7	890	1.15
730	Petugas Standarisasi dan Sertifikasi	6	690	1.15
731	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
732	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Perdagangan			
733	Analisis Perdagangan	7	890	1.20
734	Penyusun Perkembangan Harga dan Pengujian Pasar	7	890	1.15
735	Pengelola Ekspor Hasil Usaha Industri dan Usaha Perdagangan	6	690	1.15
736	Penyusun Rencana Informasi Pasar Dalam Negeri	7	890	1.15
737	Penyusun Rencana Informasi Pasar Luar Negeri	7	890	1.15

738	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
739	Pengadminitrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Pasar			
740	Analisis Pasar	7	890	1.20
741	Analisis Pengembangan Pasar	7	890	1.20
742	Pengelola Pasar	6	690	1.15
743	Pengelola Data	6	690	1.15
744	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
745	Juru Pungut Retribusi	5	490	1.20
746	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
747	Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen	6	690	1.15
748	Penilai Pelayanan Kemetrolgian	7	890	1.15
749	Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen	6	690	1.15
750	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.15
751	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
	Sekretariat			
752	Analisis Perencanaan Anggaran	7	890	1.20
753	Bendahara	6	690	1.50
754	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.48
755	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	6	690	1.15
756	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1.15
757	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690	1.15
758	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.15
759	Pengelola Surat	6	690	1.15
760	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.20
761	Pengadministrasi Umum	5	490	1.20
762	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.20
763	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.20
764	Operator Telekomunikasi	6	690	1.15
765	Pengelola Gudang	6	690	1.15
766	Pramu Kebersihan	1	190	1.80
767	Petugas Keamanan	3	340	1.40
768	Pengemudi	3	340	1.40
	Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal			
769	Penyusun Rencana Investasi	7	890	1.15
770	Penyusun Rencana Permodalan	7	890	1.15
771	Pengelola Kerjasama dan Investasi	6	690	1.15
772	Pengelola Kerjasama Penanaman Modal	6	690	1.15
773	Pengelola Pengembangan Investasi	6	690	1.15
774	Pengelola Permodalan dan Investasi	6	690	1.15

775	Pengelola Data Pengembangan Investasi	6	690	1.15
776	Pengolah Data Peraturan Investasi	6	690	1.15
	Bidang Pelayanan Penanaman Modal			
777	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	6	690	1.15
778	Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi	6	690	1.15
779	Pranata Kearsipan	6	690	1.15
780	Pengelola Dokumen Perizinan	6	690	1.15
781	Pengadministrasi Nota Perhitungan Pajak / Retribusi Daerah	5	490	1.20
782	Pengadministrasi Perizinan	5	490	1.20
783	Pengadministrasi IMB Gedung / Bangunan	5	490	1.20
	Bidang Data dan Pengendalian Penanaman Modal			
784	Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	6	690	1.15
785	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	6	690	1.15
786	Pengelola Penyaluran Investasi	6	690	1.15
787	Pengelola Data Layanan Publik dan Hubungan Investor	6	690	1.15
788	Pengadministrasi Akses Permodalan	5	490	1.20
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
	Sekretariat			
789	Bendahara	6	690	1.35
790	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.10
791	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
792	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
793	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.10
794	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Kantor	5	490	1.18
795	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6	690	1.10
796	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
797	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
798	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.18
799	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
800	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
801	Pengemudi	3	340	1.35
802	Petugas Keamanan	3	340	1.35
803	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Bidang Pengawasan dan Pengendalian			
804	Analisis Lingkungan Hidup	7	890	1.15
805	Analisis Pengaman Lingkungan	7	890	1.15
806	Penelaah Dampak Lingkungan	7	890	1.10
807	Penelaah Proses di Bidang Lingkungan	7	890	1.10
808	Pengawas Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Perlindungan Lingkungan	7	890	1.10
809	Penyuluh Lingkungan Hidup	6	690	1.10
810	Pengelola Dokumen mengenai Analisis Dampak Lingkungan	6	690	1.10

811	Pengelola Lingkungan	6	690	1.10
812	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
813	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Konservasi dan Rehabilitasi			
814	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup	7	890	1.15
815	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	7	890	1.15
816	Pengelola Pemeliharaan Konservasi Lingkungan dan Kawasan Konservasi	6	690	1.10
817	Pengelola Penyehatan Lingkungan	6	690	1.10
818	Pengelola Informasi Lingkungan	6	690	1.10
819	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	5	490	1.18
820	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
821	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Kebersihan			
822	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	1.15
822	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan	7	890	1.10
823	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	7	890	1.10
824	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir	7	890	1.10
825	Pengelola Penataan Sampah	6	690	1.10
826	Operator Alat Berat	6	690	1.10
827	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
828	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
829	Petugas Keamanan	3	340	1.35
830	Pengemudi	3	340	1.35
831	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	UPT Laboratorium Lingkungan			
832	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	7	890	1.15
833	Pengelola Sampel Pengujian	6	690	1.10
834	Pengadministrasi Akreditasi Lingkungan	5	490	1.18
835	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
836	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
837	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Jabatan Fungsional			
838	JF Teknik Penyehatan Lingkungan Pertama	8	1310	1.01
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA			
	Sekretariat			
839	Bendahara	6	690	1.35
840	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.10
841	Pengelola Keuangan APBN	6	690	1.10
842	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
843	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.10

844	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
845	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
846	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
847	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
848	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.18
849	Pramu Bakti	1	190	1.75
850	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
851	Pengemudi	3	340	1.35
852	Petugas Keamanan	3	340	1.35
	Bidang Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga			
853	Pengelola Obat dan Alat – Alat Kesehatan	6	690	1.10
854	Pengelola Bina Kesejahteraan Keluarga	6	690	1.10
855	Pengadministrasi Barang Milik Negara	5	490	1.18
856	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan			
857	Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Pedesaan	7	890	1.10
858	Pengelola data Pengendalian Masyarakat	6	690	1.10
859	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	1.18
860	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
861	Pengelola Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak	6	690	1.10
862	Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender	6	690	1.10
863	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	DINAS PERHUBUNGAN			
	Sekretariat			
864	Analisis Perencanaan dan Evaluasi	7	890	1.15
865	Analisis Pajak/Retribusi Daerah	7	890	1.15
866	Bendahara	6	690	1.35
867	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
868	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
869	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.10
870	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
871	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.10
872	Pengelola Surat	6	690	1.10
873	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
874	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690	1.10
875	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
876	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
877	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
878	Petugas Keamanan	3	340	1.35
879	Pengemudi	3	340	1.35

880	Pengolah Data	6	690	1.10
881	Pramu Bakti	1	190	1.75
882	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Bidang Perhubungan Laut, Udara, dan Perkeretaapian			
883	Analisis Angkutan Udara	7	890	1.15
884	Analisis Angkutan Laut	7	890	1.15
885	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
886	Pemeriksa Keselamatan Udara	7	890	1.10
887	Pengelola Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	6	690	1.10
888	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
889	Pengadministrasi Perjalanan Kereta Api	5	490	1.18
	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
890	Analisis Angkutan Darat	7	890	1.15
891	Analisis Lalu Lintas	7	890	1.15
892	Analisis Penanganan Objek Vital Transportasi	7	890	1.15
893	Analisis Rencana Induk Jaringan Transportasi Darat	7	890	1.15
894	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
895	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
896	Pengawas Pengujian Kendaraan Bermotor	7	890	1.10
897	Pengawas Lalu Lintas Darat	7	890	1.10
898	Pengawas Terminal	7	890	1.10
899	Pengawas Angkutan dan Terminal	7	890	1.10
900	Teknisi Survey Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan	6	690	1.10
901	Teknisi Sipil	6	690	1.10
902	Teknisi Survey Angkutan Jalan	6	690	1.10
903	Juru Pungut Retribusi	5	490	1.18
904	Pengelola Perpustakaan	6	690	1.10
905	Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor	6	690	1.10
906	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	690	1.10
907	Pengelola Usaha Angkutan	6	690	1.10
908	Pengelola Terminal	6	690	1.10
909	Penyurvei Penanganan Dampak Transportasi Darat	7	890	1.10
910	Operator Terminal	6	690	1.10
911	Pengemudi	3	340	1.35
912	Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan	6	690	1.10
913	Pengadministrasi LLAJ	5	490	1.18
914	Pengadministrasi Pelaporan dan Penyusunan Tarif Transportasi	5	490	1.18
	Bidang Lampu Penerangan Jalan Umum			
915	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
916	Pengawas Kelistrikan	7	890	1.10

917	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	690	1.10
918	Teknisi Listrik dan Jaringan	6	690	1.10
919	Pengelola Instalasi	6	690	1.10
920	Pengemudi	3	340	1.35
921	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor			
922	Pengelola Perbengkelan dan Pengujian Kendaraan Bermotor	6	690	1.10
923	Pengadministrasi Pengujian Kendaraan Bermotor	5	490	1.18
924	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.10
925	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
926	Petugas Keamanan	3	340	1.35
927	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Jabatan Fungsional			
928	JF Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	8	1260	1.00
929	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan	7	1035	1.06
930	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	6	770	1.08
931	JF Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Pemula	5	490	1.18
	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN			
	Sekretariat			
932	Bendahara	6	690	1.35
933	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
934	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.10
935	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
936	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690	1.10
937	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690	1.10
938	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.10
939	Pengelola Gaji	6	690	1.10
940	Pengelola Surat	6	690	1.10
941	Pengelola Data	6	690	1.10
942	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
943	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
944	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
945	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
946	Petugas Keamanan	3	340	1.35
947	Pramu Bakti	1	190	1.75
948	Pengemudi	3	340	1.35
	Bidang Perikanan Budidaya			
949	Analisis Benih	7	890	1.15
950	Analisis Perikanan Budidaya	7	890	1.15
951	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	7	890	1.15
952	Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	890	1.15
953	Penyusun Rencana Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	7	890	1.10

954	Penyusun Rencana Bahan Teknis Pasarana dan Sarana Budidaya	7	890	1.10
955	Pengelola Pengembangan Kelembagaan Masyarakat	6	690	1.10
956	Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan	6	690	1.10
957	Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	6	690	1.10
958	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690	1.10
959	Pengelola Statistik Perikanan	6	690	1.10
960	Pengelola Data	6	690	1.10
961	Pengelola Dokumentasi	6	690	1.10
962	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6	690	1.10
963	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Perikanan Tangkap			
964	Analisis Alat Penangkapan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	7	890	1.15
965	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	7	890	1.15
966	Analisis Perlindungan dan Pelestarian Ikan	7	890	1.15
967	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7	890	1.15
968	Analisis Kelautan dan Perikanan	7	890	1.15
969	Analisis Kenelayanan	7	890	1.15
970	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir	7	890	1.15
971	Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan	7	890	1.10
972	Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan	7	890	1.10
973	Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan	7	890	1.10
974	Teknisi Konservasi Kelautan dan Perikanan	6	690	1.10
975	Pengelola Pemantauan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	6	690	1.10
976	Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan	6	690	1.10
977	Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan	6	690	1.10
978	Pengelola Pelaksanaan Pengujian Mutu Secara Laboratoris terhadap Produk Hasil Perikanan	6	690	1.10
979	Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan	6	690	1.10
980	Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha	6	690	1.10
981	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Ketahanan Pangan			
982	Analisis Pangan	7	890	1.15
983	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	1.15
984	Pengawas Harga Pangan	7	890	1.10
985	Pengelola Pola Pangan Harapan	6	690	1.10
986	Pengelolaan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	6	690	1.10
987	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
988	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18

	Jabatan Fungsional			
989	JF Pengawas Perikanan Penyelia	8	1230	1.00
990	JF Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan	7	1005	1.07
991	JF Pengawas Perikanan Pelaksana	6	740	1.09
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN			
	Sekretariat			
992	Bendahara	6	690	1.35
993	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
994	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.10
995	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
996	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.10
997	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
998	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
998	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
999	Pengemudi	3	340	1.35
1000	Petugas Keamanan	3	340	1.35
1001	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Bidang Komunikasi			
1002	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890	1.10
1003	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1004	Pengelola Data Pengendalian Masyarakat	6	690	1.10
1005	Pengelola Data Pencegahan dan Monitoring	6	690	1.10
1006	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
1007	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik	6	690	1.10
1008	Pengelola TV dan Radio	6	690	1.10
1009	Pengelola Dokumentasi	6	690	1.10
1010	Pengelola Informasi dan Komunikasi	6	690	1.10
1011	Pengendali Jaringan Komunikasi	7	890	1.10
1012	Operator Radio	5	490	1.18
	Bidang Teknologi Informatika			
1013	Analisis Sistem Informasi	7	890	1.15
1014	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	890	1.15
1015	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1016	Pengawas Teknologi Informasi	7	890	1.10
1017	Pengelola Data Pembangunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	6	690	1.10
1018	Pengelola Database	6	690	1.10
1019	Pengelola Keamanan Sistem Informasi	6	690	1.10
1020	Pengelola Situs atau Web	6	690	1.10
1021	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
1022	Pengolah Data	6	690	1.10
1023	Pengelola Teknologi Informasi	6	690	1.10
1024	Pengelola Instalasi Teknologi Informasi	6	690	1.10

	Bidang Statistik dan Persandian			
1025	Analisis Statistik	7	890	1.15
1026	Analisis Persandian	7	890	1.15
1027	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1028	Operator sandi dan Telekomunikasi	6	690	1.10
1029	Pranata Alat Persandian	6	690	1.10
1030	Pengadministrasian Keuangan	5	490	1.18
1031	Pengelola Data Statistik	6	690	1.10
	Jabatan Fungsional			
1032	JF Pranata Humas Pelaksana Lanjutan	7	990	1.07
1033	JF Pranata Humas Pelaksana	6	740	1.09
1034	JF Pranata Komputer Pertama	8	1265	1.02
1035	JF Statistik Terampil	6	755	1.08
	SEKRETARIAT DPRD			
	Bagian Perencanaan dan Keuangan			
1036	Bendahara	6	690	1.35
1037	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
1038	Pengadministrasian Umum	5	490	1.18
1039	Pengadministrasian Keuangan	5	490	1.18
1040	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.10
1041	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1.10
1042	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6	690	1.10
	Bagian Umum			
1043	Petugas Protokol	6	690	1.10
1044	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1045	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.10
1046	Pengadministrasian Perpustakaan	5	490	1.18
1047	Pengadministrasian Kepegawaian	5	490	1.18
1048	Pengadministrasian Umum	5	490	1.18
1049	Pengadministrasian Keuangan	5	490	1.18
1050	Pengadministrasian Persuratan	5	490	1.18
1051	Petugas Keamanan	3	340	1.35
1052	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
1053	Pengemudi	3	340	1.35
	Bidang Persidangan dan Perundang-undangan			
1054	Notulis Rapat	6	690	1.10
1055	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	690	1.10
1056	Pengadministrasian Umum	5	490	1.18
1057	Pengadministrasian Rapat	5	490	1.18
	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA			
	Sekretariat			
1058	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890	1.15
1059	Bendahara	6	690	1.35
1060	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1061	Operator Komunikasi	6	690	1.10

1062	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
1063	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Kantor	5	490	1.18
1064	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Pelaksanaan APBD	6	690	1.10
1065	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
1066	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1067	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.10
1068	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
1069	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
1070	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
1071	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
1072	Pengemudi	3	340	1.35
1073	Petugas Keamanan	3	340	1.35
1074	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Bidang Pemuda			
1075	Analisis Kepemudaan	7	890	1.15
1076	Penyuluh Kepemudaan	7	890	1.10
1077	Fasilitator Kewirausahaan	7	890	1.10
1078	Pengelola Data	6	690	1.10
1079	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Olah Raga			
1080	Analisis Keolahragaan	7	890	1.15
1081	Penyuluh Olahraga	7	890	1.10
1082	Pengelola Data	6	690	1.10
1083	Fasilitator Promosi	7	890	1.10
1084	Pengelola Penataan Saran Prasaran	6	690	1.10
1085	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
1086	Pengadministrasi Sarana Prasarana	5	490	1.18
1087	Pengelola Sarana Olahraga	6	690	1.10
1088	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
	Sekretariat			
1089	Bendahara	6	690	1.35
1090	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.10
1091	Pengolah Data Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara	6	690	1.10
1092	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1093	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
1094	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.18
1095	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
1096	Pengelola Perjalanan Dinas	6	690	1.10
1097	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
1098	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
1099	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
1100	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
1101	Pengemudi	3	340	1.35

1102	Petugas Keamanan	3	340	1.35
	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil			
1103	Pengolah Data Pelayanan	6	690	1.10
1104	Pengadministrasi Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengangkatan, dan Pengesahan Anak	5	490	1.18
1105	Pengadministrasi Pengangkatan, dan Pengakuan Anak	5	490	1.18
1106	Pengadministrasi Perkawinan/ Pencatat Nikah	5	490	1.18
1107	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	5	490	1.18
1108	Pranata Kearsipan	6	690	1.10
1109	Pengelola Akta dan Legalisasi	6	690	1.10
1110	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1111	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk			
1112	Pengawas Kependudukan	7	890	1.10
1113	Pengelola Mutasi Penduduk	6	690	1.10
1114	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	690	1.10
1115	Pengolah Data Pelayanan	6	690	1.10
1116	Pengadministrasi Kependudukan	5	490	1.18
1117	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1118	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
1119	Analisis Sistem Informasi	7	890	1.15
1120	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	890	1.10
1121	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6	690	1.10
1122	Pengelola Database	6	690	1.10
1123	Pengelola Sistem dan Jaringan	6	690	1.10
1124	Pengelola Situs atau Web	6	690	1.10
1125	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690	1.10
1126	Pengolah Data	6	690	1.10
1127	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1128	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan			
1129	Analisis Perencanaan dan Kerjasama	7	890	1.15
1130	Penyusun Analisis Dampak Kependudukan	7	890	1.10
1131	Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi	7	890	1.10
1132	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	690	1.10
1133	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	690	1.10
1134	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1135	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
	DINAS SOSIAL			
	Sekretariat			
1136	Bendahara	6	690	1.35

1137	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
1138	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1139	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.10
1140	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6	690	1.10
1141	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	6	690	1.10
1142	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
1143	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
1144	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
1145	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.18
1146	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
1147	Pengemudi	3	340	1.35
1148	Petugas Keamanan	3	340	1.35
1149	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Bidang Perlindungan Sosial dan Penanganan Bencana			
1150	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1151	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	7	890	1.10
1152	Penyuluh Bimbingan / Konseling bagi Eks. Penyandang Masalah Sosial	7	890	1.10
1153	Pengelola Rehabilitasi Sosial	6	690	1.10
1154	Pengelola Penyaluran dan Pemempatan Kerja Penyandang Cacat dan Lansia	6	690	1.10
1155	Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan	6	690	1.10
1156	Pengelola Perlindungan Sosial	6	690	1.10
1157	Pengolah Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	690	1.10
1158	Pranata Bencana	6	690	1.10
1159	Pengelola Logistik	6	690	1.10
1160	Penjaga Taman Makam Pahlawan	5	490	1.18
	Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial			
1161	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1162	Pengelola Bimbingan dan Konseling	6	690	1.10
1163	Pengelola Bimbingan Sosial	6	690	1.10
1164	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	6	690	1.10
1165	Pengolah Data	6	690	1.10
1166	Pengelola Data	6	690	1.10
1167	Pengadministrasi Anak Terlantar	5	490	1.18
1168	Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial	5	490	1.18
1169	Pengadministrasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	5	490	1.18
1170	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			
	Sekretariat			
1171	Bendahara	6	690	1.35
1172	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1173	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1174	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.10

1175	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690	1.10
1176	Pengelola kendaraan dan Perjalanan Dinas	6	690	1.10
1177	Pengolah Data Laporan Realisasi Anggaran	6	690	1.10
1178	Pengelola Data Laporan dan Pengaduan	6	690	1.10
1179	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
1180	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.18
1181	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
1182	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
1183	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
1184	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
1185	Petugas Keamanan	3	340	1.35
1186	Pengemudi	3	340	1.35
1187	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat			
1188	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	7	890	1.10
1189	Petugas Penindakan	6	690	1.10
1190	Pengelola Ketertiban	6	690	1.10
1191	Pengelola Disiplin Pegawai	6	690	1.10
1192	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	6	690	1.10
1193	Pengolah Data Satuan Pengawas Internal	6	690	1.10
1194	Pengadminintrasi Pelatihan	5	490	1.18
	Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah			
1195	Penyusun Bahan Materi Penyuluhan	7	890	1.10
1196	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890	1.10
1197	Penyidik	7	890	1.10
1198	Petugas Penindakan	6	690	1.10
1199	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	6	690	1.10
1200	Pengelola Peraturan Perundang Undangan	6	690	1.10
1201	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS)			
1202	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	890	1.10
1203	Penyuluh Keamanan Masyarakat	7	890	1.10
1204	Penyuluh Bencana	7	890	1.10
1205	Pranata Bencana	6	690	1.10
1206	Pranata Perlindungan Masyarakat	6	690	1.10
	Bidang Penanggulangan Kebakaran			
1207	Analisis Kebakaran	7	890	1.15
1208	Pranata Pemadam Kebakaran	6	690	1.10
1209	Pengelola Bimbingan Masyarakat	6	690	1.10
1210	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	5	490	1.18
	BADAN PENDAPATAN DAERAH			
	Sekretariat			
1211	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	890	1.15

1212	Bendahara	6	690	1.35
1213	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1214	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
1215	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.10
1216	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
1216	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.18
1217	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
1218	Pengadministrasi Penerimaan	5	490	1.18
1219	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
1220	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
1221	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1222	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.10
1223	Pramu Bakti	1	190	1.75
1224	Pengemudi	3	340	1.35
1225	Petugas Keamanan	3	340	1.35
1226	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Bidang Pendataan dan Penerapan			
1227	Analisis Pajak Daerah	7	890	1.15
1228	Verifikator Pajak	6	690	1.10
1229	Pengelola Pendaftaran, Pendataan Pajak dan Retribusi	6	690	1.10
1230	Pengelola Pajak Daerah	6	690	1.10
1231	Juru Sita	6	690	1.10
1232	Pengadministrasi Pajak	5	490	1.18
1233	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
	Bidang Penagihan dan Pemeriksaan			
1234	Analisis Penagihan Pajak	7	890	1.15
1235	Analisis Pendapatan Daerah	7	890	1.15
1236	Analisis Pemeriksaan	7	890	1.15
1237	Analisis Penilaian	7	890	1.15
1238	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	6	690	1.10
1239	Pengelola Pendapatan	6	690	1.10
1240	Pengolah Data Penagihan Pajak	6	690	1.10
1241	Pengadministrasi Pajak	5	490	1.18
1242	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
	Sekretariat			
1243	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	890	1.15
1244	Bendahara	6	690	1.35
1245	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1246	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
1247	Pranata Barang dan Jasa	6	690	1.10
1248	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
1249	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18

1250	Pengemudi	3	340	1.35
1251	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
1252	Petugas Keamanan	3	340	1.35
	Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai			
1253	Analisis Pengembangan Karir	7	890	1.15
1254	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890	1.15
1255	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	890	1.15
1256	Analisis Jabatan	7	890	1.15
1257	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
	Bidang Pendidikan dan Pelatihan			
1258	Analisis Diklat	7	890	1.15
1259	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat	7	890	1.10
1260	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Kantor	5	490	1.18
1261	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	6	690	1.10
1262	Pengadministrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	5	490	1.18
	Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data			
1263	Analisis Pelanggaran Disiplin	7	890	1.15
1264	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	6	690	1.10
1265	Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai	6	690	1.10
1266	Pengelola Tata Naskah	6	690	1.10
1267	Pengolah Data	6	690	1.10
	Jabatan Fungsional			
1268	JF Auditor Kepegawaian Pertama	8	1280	1.02
1269	JF Analisis Kepegawaian Pertama	8	1280	1.02
	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI			
	Sekretariat			
1270	Bendahara	6	690	1.35
1271	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1272	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.10
1273	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1274	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.10
1275	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.10
1276	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
1277	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
1278	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.18
1279	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
1280	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.18
1281	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
1282	Petugas Keamanan	3	340	1.35
1283	Pengemudi	3	340	1.35
1284	Pramu Kebersihan	1	190	1.75
	Bidang Transmigrasi			
1285	Analisis Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan	7	890	1.15

	Edukasi			
1286	Analisis Kawasan Transmigrasi	7	890	1.15
1287	Pengelola Ketransmigrasian	6	690	1.10
1288	Pranata Ketransmigrasian	6	690	1.10
1289	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Penempatan Tenaga Kerja			
1290	Analisis Bahan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	7	890	1.15
1291	Analisis Tenaga Kerja	7	890	1.15
1292	Pengelola Tenaga Kerja	6	690	1.10
1293	Pengolah Bahan Perencanaan Ketenagaan	6	690	1.10
1294	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Hubungan Industrial			
1295	Analisis Industri	7	890	1.15
1296	Pengolah Data	6	690	1.10
1297	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Jabatan Fungsional			
1298	JF Perantara Hubungan Industrial Madya	11	1930	1.53
1299	JF Perantara Hubungan Industrial Muda	9	1355	1.40
1300	JF Perantara Hubungan Industrial Pertama	8	1280	1.02
1301	JF Pengantar Kerja Pertama	8	1280	1.02
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO			
	Sekretariat			
1302	Bendahara	6	690	1.35
1303	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.10
1304	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.33
1305	Pengelola Gaji	6	690	1.10
1306	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
1307	Pengelola Data	6	690	1.10
1308	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.18
1309	Pengemudi	3	340	1.35
1310	Pramu Bakti	1	190	1.75
1311	Petugas Keamanan	3	340	1.35
1312	Pengelola Surat	6	690	1.10
1313	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.18
1314	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890	1.10
1315	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.10
	Bidang Kelembagaan Koperasi			
1316	Penyuluh Koperasi	7	890	1.10
1317	Penyuluh, Mediasi dan Advokasi Koperasi	7	890	1.10
1318	Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi	6	690	1.10
1319	Pranata Koperasi	6	690	1.10
1320	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Usaha Koperasi			
1321	Pengelola Akuntansi	6	690	1.10
1322	Analisis Koperasi	7	890	1.15

1323	Pengelola Kreativitas dan Inovasi	6	690	1.10
1324	Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Koperasi	6	690	1.10
1325	Pengadministrasi Izin Usaha	5	490	1.18
1326	Pengadministrasi Umum	5	490	1.18
	Bidang Usaha Mikro			
1327	Analisis Bimbingan Usaha	7	890	1.15
1328	Fasilitator Kewirausahaan	7	890	1.10
1329	Fasilitator Promosi	7	890	1.10
1330	Fasilitator Sarana Pemasaran	7	890	1.10
1331	Penelaah Pengembangan Usaha	7	890	1.10
1332	Pengadministrasi Sarana Pengembangan Usaha	5	490	1.18
1333	Pengelola Data Kreativitas dan Inovasi	6	690	1.10
1334	Pengelola Pengembangan Induksi Bisnis dan Workshop	6	690	1.10
1335	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	7	890	1.10
1336	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	7	890	1.10
1337	Penyusun Rencana Kemitraan Usaha Besar	7	890	1.10
1338	Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	7	890	1.10
1339	Penyusun Rencana Pengembangan produk Skala Mikro, Kecil dan Menengah	7	890	1.10
1340	Penyusun Rencana Sarana Pengembangan Usaha	7	890	1.10
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
	Sekretariat			
1341	Analisis Rencana dan Kegiatan	7	890	1.10
1342	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890	1.05
1343	Bendahara	6	690	1.30
1344	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.05
1345	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.28
1346	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.05
1347	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Kantor	5	490	1.15
1348	Pranata Laporan Keuangan	6	690	1.05
1349	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1350	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.15
1351	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1352	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.15
1353	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.15
1354	Pengemudi	3	340	1.30
1355	Petugas Keamanan	3	340	1.30
1356	Pramu Kebersihan	1	190	1.70
	Bidang Perumahan			
1357	Analisis Bangunan dan Perumahan	7	890	1.10
1358	Analisis Perumahan	7	890	1.10

1359	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7	890	1.05
1360	Juru Survey Perumahan dan Pemukiman	5	490	1.15
1361	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	690	1.05
1362	Pengadminsitrasi IMB Gedung / Bangunan	5	490	1.15
1363	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1364	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1365	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	6	690	1.05
	Bidang Kawasan Permukiman			
1366	Analisis Penataan Kawasan	7	890	1.10
1367	Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Kawasan	7	890	1.05
1368	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan	7	890	1.05
1369	Pengawas Fisik Permukiman	7	890	1.05
1370	Pranata Kawasan Konservasi	6	690	1.05
1371	Pengelola Tata Ruang dan Konservasi Kawasan	6	690	1.05
1372	Pengelola Perumahan dan Permukiman	6	690	1.05
1373	Juru Survey Permukiman dan Perumahan	5	490	1.15
1374	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1375	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1376	Pengelola Kegiatan Survey dan Perencanaan	6	690	1.05
	Jabatan Fungsional			
1377	JF Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	8	1325	0.97
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			
	Sekretariat			
1378	Bendahara	6	690	1.30
1379	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.05
1380	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.05
1381	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	6	690	1.05
1382	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.05
1383	Pengadministrasi Sarana Prasarana Kantor	5	490	1.15
1384	Pengelola Daftar Gaji	6	690	1.05
1385	Operator Telekomunikasi	6	690	1.05
1386	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.28
1387	Pranata Laporan Keuangan	6	690	1.05
1388	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.15
1389	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1390	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.15
1391	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1392	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.15
1393	Pramu Kebersihan	1	190	1.70
1394	Pramu Taman	1	190	1.70
1395	Pengemudi	3	340	1.30
1396	Petugas Keamanan	3	340	1.30

	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
1397	Analisis SAR	7	890	1.10
1398	Analisis Mitigasi Bencana	7	890	1.10
1399	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	890	1.05
1400	Operator Tayangan Multimedia dan SMS	6	690	1.05
1401	Penyuluh Bencana	7	890	1.05
1402	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	690	1.05
1403	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1404	Pengelola Data	6	690	1.05
1405	Analisis Kesiapsiagaan	7	890	1.10
	Bidang Kedaruratan dan Logistik			
1406	Analisis SAR	7	890	1.10
1407	Analisis Mitigasi Bencana	7	890	1.10
1408	Analisis Bencana	7	890	1.10
1409	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	890	1.05
1410	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	7	890	1.05
1411	Penyusun Bahan Pemberian Bantuan Bencana Teknis	7	890	1.05
1412	Penyuluhan Bencana	7	890	1.05
1413	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.28
1414	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	690	1.05
1415	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1416	Pengelola Data	6	690	1.05
	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi			
1417	Analisis Rehabilitasi dan Konservasi	7	890	1.10
1418	Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	7	890	1.10
1419	Penyusun Rencana Rehabilitasi	7	890	1.05
1420	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam	7	890	1.05
1421	Penyuluh Bencana	7	890	1.05
1422	Konselor	7	890	1.05
1423	Pengelola Bahan Rencana Penanggulangan Bencana	6	690	1.05
1424	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1425	Pengelola Data	6	690	1.05
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
	Sekretariat			
1426	Bendahara	6	690	1.30
1427	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.28
1428	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.05
1429	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.05
1430	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.15
1431	Pengolah Daftar Gaji	6	690	1.05
1432	Pengelola Data	6	690	1.05
1433	Pranata Teknologi Informasi Komputer	6	690	1.05
1434	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15

1435	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.15
1436	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1437	pengadministrasi Persuratan	5	490	1.15
1438	Pengemudi	3	340	1.30
1439	Petugas Keamanan	3	340	1.30
1440	Pramu Kebersihan	1	190	1.70
	Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan			
1441	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1442	Pengelola Data	6	690	1.05
1443	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
	Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik			
1444	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1445	Pengelola Data	6	690	1.05
1446	Penyuluh Kemasyarakatan	7	890	1.05
1447	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
	Bidang Budaya Politik, Kelembagaan Politik dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
1448	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1449	Pengelola Data Partisipasi	6	690	1.05
1450	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	6	690	1.05
1451	Pengelola Organisasi politik dan Organisasi Kemasyarakatan	6	690	1.05
1452	Penyuluh Hak Asasi Manusia	7	890	1.05
1453	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	Sekretariat			
1457	Bendahara	6	690	1.30
1458	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.28
1459	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.05
1460	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.15
1461	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	890	1.05
1462	Pengelola Bahan Perencanaan	6	690	1.05
1463	Pengelola Gaji	6	690	1.05
1464	Pranata Kearsipan	6	690	1.05
1465	Pengadministrasi Persuratan	5	490	1.15
1466	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1467	Petugas Keamanan	3	340	1.30
1468	Pengemudi	3	340	1.30
1469	Pramu Kebersihan	1	190	1.70
1470	Pramu Bakti	1	190	1.70
	Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Perdesaan			
1471	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15

1472	Pengolah Bahan Perencanaan	6	690	1.05
	Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya			
1473	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1474	Pengolah Bahan Perencanaan	6	690	1.05
	Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa			
1475	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1476	Pengolah Bahan Perencanaan	6	690	1.05
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			
	Sekretariat			
1477	Bendahara	6	690	1.30
1478	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.28
1479	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	890	1.05
1480	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.05
1481	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1482	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	490	1.15
1483	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1484	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.15
1485	Pramu Kebersihan	1	190	1.70
1486	Petugas Keamanan	3	340	1.30
1487	Pengemudi	3	340	1.30
	Bidang Perpustakaan			
1488	Penyusun Rencana Humas dan Perpustakaan	7	890	1.05
1489	Pengelola Bahan Pustaka	6	690	1.05
1490	Penyuluh Perpustakaan	7	890	1.05
1491	Pengadministrasian Perpustakaan	5	490	1.15
	Bidang Kearsipan			
1492	Penyuluh Kearsipan	7	890	1.05
1493	Pranata Kearsipan	6	690	1.05
1494	Pranata Restorasi Arsip	6	690	1.05
1495	Pranata Reproduksi Arsip	6	690	1.05
	Jabatan Fungsional			
1496	JF Pustakawan Pertama	8	1265	0.98
1497	JF Arsiparis Pertama	8	1280	0.98
	KECAMATAN			
	Sekretariat			
1498	Bendahara	6	690	1.30
1499	Pengelola Program dan Kegiatan	6	690	1.05
1500	Pengelola Barang Milik Negara	6	690	1.28
1501	Pengelola Kepegawaian	6	690	1.05
1502	Pengadministrasi Keuangan	5	490	1.15
1503	Pengadministrasi Kepegawaian	5	490	1.15
1504	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15

1505	Pengemudi	3	340	1.30
1506	Pramu Kebersihan	1	190	1.70
	Seksi Pelayanan Masyarakat			
1507	Pengolah Data Pelayanan	6	690	1.05
	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat			
1508	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	1.05
1509	Pengelola Kesejahteraan Sosial	6	690	1.05
1510	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
	Seksi Tata Pemerintahan dan Ketentraman, Ketertiban Umum			
1511	Pengelola Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah	6	690	1.05
1512	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	6	690	1.05
1513	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690	1.05
1514	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	690	1.05
1515	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
	Kelurahan			
1516	Verifikator Data Laporan Keuangan	6	690	1.05
1517	Pengelola Sarana dan Prasarana	6	690	1.05
1518	Pengelola Administrasi Pemerintahan	6	690	1.05
1519	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	690	1.05
1520	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	6	690	1.05
1521	Pengolah Data Pelayanan	6	690	1.05
1522	Pengadministrasi Umum	5	490	1.15
1523	Pramu Kebersihan	1	190	1.70

BUPATI BANYUWANGI,
TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 16 Tahun 2019

TANGGAL : 1 April 2019

BESARAN HARGA UNTUK SETIAP NILAI JABATAN

Besaran harga untuk setiap nilai jabatan untuk Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600,00 (Enam Ratus Rupiah).

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

BESARAN HARGA UNTUK SETIAP POIN AKTIVITAS PEGAWAI
PER KELAS JABATAN

KELAS/NILAI JABATAN		HARGA POIN AKTIVITAS KERJA PER KELAS JABATAN (Rp)
Kelas	Nilai	
1	190 – 240	150,00
2	245 – 300	175,00
3	305 – 370	200,00
4	375 – 450	225,00
5	455 – 650	250,00
6	655 – 850	275,00
7	855 – 1100	300,00
8	1105 – 1350	325,00
9	1355 – 1600	350,00
10	1605 – 1850	375,00
11	1855 – 2100	400,00
12	2105 – 2350	425,00
13	2355 – 2750	450,00
14	2755 – 3150	475,00
15	3155 – 3650	500,00

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 16 Tahun 2019

TANGGAL : 1 April 2019

BESARAN UANG PENUNJANG MOBILITAS KERJA

NO.	JABATAN	HARGA / PER BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi	8.400.000,00
2	Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi	7.560.000,00
3	Kepala Bappeda/Kepala BPKAD/Inspektur Kabupaten Banyuwangi	7.000.000,00
4	Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi	6.720.000,00
5	Staf Ahli Bupati Banyuwangi	6.720.000,00
6	Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi	6.160.000,00
7	Camat di Kabupaten Banyuwangi	5.320.000,00
8	Sekretaris Bappeda/Sekretaris BPKAD/Sekretaris Inspektorat/ Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Kabupaten Banyuwangi	4.200.000,00
9	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/ Sekretaris Badan/Dinas Kabupaten Banyuwangi	3.640.000,00
10	Kepala Bidang Bappeda/Kepala Bidang BPKAD Kabupaten Banyuwangi	2.800.000,00
11	Kepala Bidang Badan/Dinas/Sekcam Kabupaten Banyuwangi	2.240.000,00
12	Lurah di Kabupaten Banyuwangi	1.120.000,00

13	Kasubag pada Sekretariat Daerah/ Kasubag pada Bappeda/Kasubag pada BPKAD dan Kasubid pada Bappeda/BPKAD Kabupaten Banyuwangi	1.120.000,00
14	Kasubag/Kasi/Kasubid pada Badan/Dinas/ Inspektorat/ Sekretariat DPRD/Kasi pada Kecamatan Kabupaten Banyuwangi	840.000,00
15	Sekretaris Kelurahan/Kasi pada Kelurahan/Kasubag pada Kecamatan Kabupaten Banyuwangi	560.000,00

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 16 Tahun 2019

TANGGAL : 1 April 2019

CLUSTER SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	SKPD	CLUSTER
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi	I
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi	
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi	
4.	Inspektorat Kabupaten Banyuwangi	
5.	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi	
7.	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi	
8.	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi	
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi	
10.	Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi	
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi	
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi	
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi	II
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi	
15.	Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi	
16.	Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi	
17.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi	
18.	Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi	
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi	
20.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi	
21.	Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi	
22.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi	
23.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi	
24.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi	
25.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi	
26.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi	
27.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi	III
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi	
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi	

30.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi	
31.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi	
32.	Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi	

BUPATI BANYUWANGI

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS